



# LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Laporan Keuangan  
Dinas Pendapatan Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan  
(a) Laporan Realisasi Anggaran;  
(b) Laporan Operasional;  
(c) Laporan Perubahan Ekuitas;  
(d) Neraca; dan  
(e) Catatan Atas Laporan Keuangan

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Laporan Operasional;
- (c) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (d) Neraca; dan
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi operasional/kinerja, pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanggal, 31 Januari 2019

PENGGUNA ANGGARAN

**Drs. H. TAUTOTO, I.R. M. SI**

Pangkat Pembina Utama Madya  
NIP 19640811 199303 1 006

## **DAFTAR ISI**

Pernyataan Tanggung Jawab -----	ii
Laporan Realisasi Anggaran -----	iii
Laporan Operasional -----	v
Laporan Perubahan Ekuitas -----	vi
Neraca -----	viii
Daftar Isi-----	ix

### Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan -----	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ---	4
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan -----	5
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan -	6
BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan -----	8
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan ---	8
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan -----	17
BAB III Penjelasan Pos-PoS Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan -----	18
3.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos -----	18
3.1.1 Laporan Realisasi Anggaran-----	18
A. Pendapatan-LRA-----	18
B. Belanja-----	22
3.1.2 Laporan Operasional-----	25
A. Pendapatan-LO-----	25
B. Beban -----	33
3.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas -----	38
A. Ekuitas Awal-----	38
B. Surplus/Defisit-LO-----	39

C. Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar -----	39
D. Ekuitas Akhir -----	40
3.1.4 Neraca-----	40
A. Aset-----	40
B. Kewajiban-----	56
C. Ekuitas -----	57
3.2 Pengungkapan atas pos-pos yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual	57
BAB IV Penjelasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan OPD-----	59
4.1 Struktur Organisasi -----	59
4.2 Tugas dan Fungsi-----	60
4.3 Sumber Daya Manusia	
4.4 -----	61
4.5 Visi dan Misi -----	61
BAB IV Penutup-----	62
Lampiran-Lampiran-----	64

**CATATAN ATAS  
LAPORAN  
KEUANGAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas,

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca OPD; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan OPD.

#### **A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

## **B. LAPORAN OPERASIONAL.**

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit dari suatu entitas akuntansi yang penyajiannya disandingkan dengan priode sebelumnya. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai:

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi;
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam priode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional). Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
  - A.1 Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - A.2 Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan Perubahan Ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **D. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

## **E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-trasaksi dan kejadian kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi

para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan OPD berpedoman pada i Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- m. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- n. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** Berisi pendahuluan yang membahas secara umum maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

**BAB II** Berisi Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang membahas secara umum tentang indikator target kinerja keuangan yang terdiri dari indikator makro pembangunan dan indikator bidang-bidang pembangunan serta indikator keberhasilan pembangunan.

**BAB III** Berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan yang membahas secara rinci tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan serta Pengungkapan atas pos-pos Asset dan kewajiban lain-lain.

**BAB IV** Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD

**BAB V** Penutup

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

#### RINCIAN REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi	
					Keu (%)	Fisik(%)
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3,762,403,432,859.00</b>	<b>3,794,401,227,965.85</b>	<b>31,997,795,106.85</b>	<b>100.85</b>	<b>100.00</b>
1	Pajak Daerah	3,462,102,500,000.00	3,462,184,656,928.00	82,156,928.00	100.00	100.00
2	Hasil retribusi Daerah	154,530,000.00	166,305,200.00	11,775,200.00	107.62	100.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	109,489,402,859.00	108,949,315,359.00	(540,087,500.00)	99.51	100.00
4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	185,472,000,000.00	217,915,950,478.85	32,443,950,478.85	117.49	100.00
5	Pendapatan Hibah	5,185,000,000.00	5,185,000,000.00	-	100.00	100.00
<b>B</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>129,077,274,528.00</b>	<b>108,579,723,728.00</b>	<b>(20,497,550,800.00)</b>	<b>84.12</b>	<b>91.67</b>
1	Gaji dan Tunjangan  Ket : Tingkat capaian keuangan 94,29 % dikarenakan adanya penyesuaian belanja gaji pegawai yang pensiun tahun 2018, serta Mutasi pegawai serta penyesuaian acrees 2,5 %	28,301,809,118.00	26,686,805,070.00	(1,615,004,048.00)	94.29	100.00
2	Tambahan Penghasilan PNS	4,524,002,910.00	4,331,000,000.00	(193,002,910.00)	95.73	100.00
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah  Ket : Tingkat capaian keuangan 80,58 % dikarenakan tidak dibayarkannya belanja insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018	96,251,462,500.00	77,561,918,658.00	(18,689,543,842.00)	80.58	75.00

<b>C</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>78,105,296,100.44</b>	<b>75,244,997,637.00</b>	<b>(2,860,298,463.44)</b>	<b>96.34</b>	<b>100.00</b>
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>58,119,477,200.44</b>	<b>56,105,562,013.00</b>	<b>(2,013,915,187.44)</b>	<b>96.53</b>	<b>100.00</b>
1	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Makassar I	3,179,798,000.00	3,095,277,796.00	(84,520,204.00)	97.34	100.00
2	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Pare-Pare	1,412,880,000.00	1,387,803,130.00	(25,076,870.00)	98.23	100.00
3	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Palopo	2,106,538,000.00	2,039,788,341.00	(66,749,659.00)	96.83	100.00
4	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Bone. Ket : Tingkat capaian keuangan 93,04 % dikarenakan adanya penyesuaian belanja jasa kantor dengan kebutuhan operasional pelayanan di kantor UPTB Wil. Bone	1,669,511,000.00	1,553,381,971.00	(116,129,029.00)	93.04	100.00
5	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Wajo	1,658,138,700.00	1,631,448,254.00	(26,690,446.00)	98.39	100.00
6	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Maros	1,539,818,000.00	1,463,910,825.00	(75,907,175.00)	95.07	100.00
7	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Bantaeng	1,425,770,000.00	1,414,646,360.00	(11,123,640.00)	99.22	100.00
8	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Pangkep Ket : Tingkat capaian keuangan 93,80 % dikarenakan adanya penyesuaian belanja jasa kantor dengan kebutuhan operasional pelayanan di kantor UPTB Wil. Pangkep	1,147,633,500.00	1,076,511,609	(71,121,891.00)	93.80	100.00
9	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Gowa	1,663,056,950.00	1,617,894,541	(45,162,409.00)	97.28	100.00
10	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Sidrap	1,519,408,500.00	1,504,969,726	(14,438,774.00)	99.05	100.00
11	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Pinrang	1,289,242,400.00	1,261,366,835	(27,875,565.00)	97.84	100.00
12	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Tana Toraja	1,023,513,000.00	979,505,951	(44,007,049.00)	95.70	100.00

13	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Luwu Timur	1,266,354,000.00	1,246,216,591	(20,137,409.00)	98.41	100.00
14	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Soppeng	1,055,554,500.00	1,034,163,946	(21,390,554.00)	97.97	100.00
15	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Bulukumba  Ket : Tingkat capaian keuangan 93,40 % dikarenakan adanya penyesuaian belanja jasa kantor dengan kebutuhan operasional pelayanan di kantor UPTB Wil. Bulukumba	1,514,479,900.00	1,414,568,753	(99,911,147.00)	93.40	100.00
16	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Jeneponto	1,321,960,000.00	1,283,417,037	(38,542,963.00)	97.08	100.00
17	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Enrekang  Ket : Tingkat capaian keuangan 93,99 % dikarenakan adanya penyesuaian belanja jasa kantor dengan kebutuhan operasional pelayanan di kantor UPTB Wil. Enrekang	1,231,245,000.00	1,157,294,138	(73,950,862.00)	93.99	100.00
18	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Luwu	1,977,268,000.00	1,941,143,180	(36,124,820.00)	98.17	100.00
19	Pengelolaan Barang Dan Jasa Kebutuhan Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	15,153,083,050.44	14,615,541,156	(537,541,894.44)	96.45	100.00
20	Inventarisasi Barang Dan Jasa Neraca Badan Pendapatan Daerah	423,326,000.00	412,454,734	(10,871,266.00)	97.43	100.00
21	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	1,485,500,000.00	1,480,765,000	(4,735,000.00)	99.68	100.00
22	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Makassar II	2,551,795,000.00	2,464,274,448	(87,520,552.00)	96.57	100.00
23	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Selayar	1,076,660,000.00	1,023,680,608	(52,979,392.00)	95.08	100.00
24	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Toraja Utara	988,437,000.00	948,934,482	(39,502,518.00)	96.00	100.00
25	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Luwu Utara	1,324,735,000.00	1,305,507,747	(19,227,253.00)	98.55	100.00

26	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Barru	1,142,506,700.00	1,119,723,052	(22,783,648.00)	98.01	100.00
27	Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Ket : Tingkat capaian keuangan 92,69 % dikarenakan adanya penyesuaian belanja jasa kantor dengan kebutuhan operasional Pengelolaan pendapatan daerah	3,301,940,000.00	3,060,732,399	(241,207,601.00)	92.69	100.00
28	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Sinjai	1,481,220,000.00	1,447,704,202	(33,515,798.00)	97.74	100.00
29	Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah Uptb Wil. Takalar Ket : Tingkat capaian keuangan 94,51 % dikarenakan adanya penyesuaian belanja jasa kantor dengan kebutuhan operasional pelayanan di kantor UPTB Wil. Takalar	1,188,105,000.00	1,122,935,201	(65,169,799.00)	94.51	100.00
<b>II.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD</b>	<b>330,082,500.00</b>	<b>328,679,340.00</b>	<b>(1,403,160.00)</b>	<b>99.57</b>	<b>100.00</b>
1	Peningkatan Kapasitas SDM Operator sistem dan Operator Data	120,979,000.00	120,979,000	-	100.00	100.00
2	Peningkatan SDM Aparatur Laki-laki/Perempuan Pengelola Pendapatan Daerah	209,103,500.00	207,700,340	(1,403,160.00)	99.33	100.00
<b>III.</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD</b>	<b>1,738,005,500.00</b>	<b>1,707,158,855.00</b>	<b>(30,846,645.00)</b>	<b>98.23</b>	<b>100.00</b>
1	Koordinasi Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan dan Evaluasi Kinerja Bidang Pendapatan	159,499,500.00	158,917,195	(582,305.00)	99.63	100.00
2	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan	856,605,000.00	838,310,647	(18,294,353.00)	97.86	100.00
3	Asistensi Penyusunan Target Pokok dan Target Perubahan dibidang pendapatan daerah.	240,721,000.00	238,421,200	(2,299,800.00)	99.04	100.00
4	Penyusunan Laporan, Rekonsiliasi, Realisasi dan Pertanggungjawaban Keuangan	481,180,000.00	471,509,813	(9,670,187.00)	97.99	100.00
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>17,251,584,900.00</b>	<b>16,440,437,926.00</b>	<b>(811,146,974.00)</b>	<b>95.30</b>	<b>100.00</b>
1	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB. Wil. Makassar I	108,274,000.00	108,103,900	(170,100.00)	99.84	100.00

2	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB. Wil. Pare-Pare	71,974,000.00	71,958,000	(16,000.00)	99.98	100.00
3	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB. Wil. Palopo	71,074,000.00	70,644,000	(430,000.00)	99.39	100.00
4	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB. Wil. Bone	91,800,000.00	89,099,000	(2,701,000.00)	97.06	100.00
5	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB. Wil. Wajo.	66,474,000.00	66,054,000	(420,000.00)	99.37	100.00
6	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB. Wil. Bantaeng	72,202,000.00	72,187,000	(15,000.00)	99.98	100.00
7	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB. Wil. Gowa	105,974,000.00	105,934,000	(40,000.00)	99.96	100.00
8	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Pinrang	79,474,000.00	79,354,000	(120,000.00)	99.85	100.00
9	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Maros	79,374,000.00	79,228,000	(146,000.00)	99.82	100.00
10	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Pangkep	80,874,000.00	80,646,900	(227,100.00)	99.72	100.00
11	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Sidrap	75,150,000.00	75,055,000	(95,000.00)	99.87	100.00
12	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil.Tana Toraja	73,397,000.00	71,763,500	(1,633,500.00)	97.77	100.00
13	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Luwu Timur	74,474,000.00	74,354,000	(120,000.00)	99.84	100.00
14	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Soppeng	67,874,000.00	67,874,000	-	100.00	100.00
15	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Bulukumba	48,094,000.00	47,809,000	(285,000.00)	99.41	100.00
16	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Barru	73,935,000.00	72,880,000	(1,055,000.00)	98.57	100.00
17	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Luwu	67,474,000.00	67,354,000	(120,000.00)	99.82	100.00
18	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Sinjai	73,232,000.00	71,512,000	(1,720,000.00)	97.65	100.00

19	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Takalar  Ket : Tingkat capaian Keuangan 87.46 % dikarenakan adanya penyesuaian tingkat pendidikan terhadap kebutuhan Instruktur/Tenga Ahli Non PNS	81,171,000.00	70,996,000	(10,175,000.00)	87.46	100.00
20	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Selayar.	51,884,000.00	50,262,000	(1,622,000.00)	96.87	100.00
21	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Toraja Utara	63,014,000.00	62,754,000	(260,000.00)	99.59	100.00
22	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Luwu Utara	59,774,000.00	59,633,700	(140,300.00)	99.77	100.00
23	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Jeneponto	66,924,000.00	66,879,500	(44,500.00)	99.93	100.00
24	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Enrekang	67,918,000.00	65,456,000	(2,462,000.00)	96.38	100.00
25	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Makassar I	388,139,000.00	385,113,000	(3,026,000.00)	99.22	100.00
26	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Selayar  Ket : Tingkat capaian Keuangan 90.46 % dikarenakan adanya penyesuaian tingkat pendidikan terhadap kebutuhan Instruktur/Tenga Ahli Non PNS	383,139,000.00	346,604,000	(36,535,000.00)	90.46	100.00
27	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Pare – Pare	680,139,000.00	669,349,800	(10,789,200.00)	98.41	100.00
28	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Palopo	383,214,000.00	367,406,000	(15,808,000.00)	95.87	100.00
29	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Bone	456,114,000.00	446,895,000	(9,219,000.00)	97.98	100.00
30	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Wajo	451,039,000.00	436,693,000	(14,346,000.00)	96.82	100.00
31	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Jeneponto	378,139,000.00	363,292,800	(14,846,200.00)	96.07	100.00
32	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Wil. Gowa	384,079,000.00	376,279,000	(7,800,000.00)	97.97	100.00
33	Pemeriksaan Administasi Pengelolaan Pendapatan	329,216,000.00	328,920,560	(295,440.00)	99.91	100.00
34	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Maros	758,739,000.00	676,793,500	(81,945,500.00)	89.20	100.00

	Ket : Tingkat capaian Keuangan 89.20 % dikarenakan adanya penyesuaian tingkat pendidikan terhadap kebutuhan Instruktur/Tenga Ahli Non PNS serta penyesuaian terhadap pelaksanaan sosialisasi pajak daerah					
35	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Barru	679,754,000.00	666,431,000	(13,323,000.00)	98.04	100.00
36	Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Bapenda Prov. Sul Sel	330,902,000.00	329,277,056	(1,624,944.00)	99.51	100.00
37	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Luwu Timur Ket : Tingkat capaian Keuangan 92.86 % dikarenakan adanya penyesuaian tingkat pendidikan terhadap kebutuhan Instruktur/Tenga Ahli Non PNS	383,139,000.00	355,800,500	(27,338,500.00)	92.86	100.00
38	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Takalar Ket : Tingkat capaian Keuangan 91.86 % dikarenakan adanya penyesuaian tingkat pendidikan terhadap kebutuhan Instruktur/Tenga Ahli Non PNS	381,039,000.00	350,021,000	(31,018,000.00)	91.86	100.00
39	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Ket : Tingkat capaian keuangan 34.38 % Penyesuaian terhadap Belanja jasa konsultasi ekstensifikasi sumber sumber pendapatan	308,272,900.00	105,986,065	(202,286,835.00)	34.38	100.00
40	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Teknis di bidang Pendapatan	159,096,500.00	155,119,827	(3,976,673.00)	97.50	100.00
41	Asistensi dan Evaluasi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Ket : Tingkat capaian Keuangan 92.90 % dikarenakan adanya penyesuaian belanja jasa kantor dan perjalanan dinas	249,230,000.00	231,542,200	(17,687,800.00)	92.90	100.00
42	Koordinasi , Pendataan , Penagihan, Pemantauan dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Rokok dengan Pemerintah Pusat dan UPTB	91,845,000.00	88,078,551	(3,766,449.00)	95.90	100.00
43	Pemantauan HPU Kendaraan bermotor serta penyusunan dan sosialisasi tabel NJKB	258,288,000.00	248,077,778	(10,210,222.00)	96.05	100.00

44	Optimalisasi dan koordinasi pemungutan pajak daerah	381,028,000.00	364,959,760	(16,068,240.00)	95.78	100.00
45	Rekonsiliasi Data Unit Kendaraan Bermotor	263,949,500.00	258,683,500	(5,266,000.00)	98.00	100.00
46	Monitoring dan evaluasi pajak kendaraan bermotor Ket : Tingkat capaian Keuangan 92.22 % dikarenakan adanya penyesuaian belanja jasa kantor, dan makan dan minum rapat	58,462,000.00	53,914,000	(4,548,000.00)	92.22	100.00
47	Pengelolaan dokumen administrasi pemungutan retribusi daerah	276,850,000.00	276,141,000	(709,000.00)	99.74	100.00
48	Pemutakhiran Data Base Objek dan Subjek Pajak daerah	76,770,000.00	76,749,900	(20,100.00)	99.97	100.00
49	Evaluasi Penerimaan retribusi daerah dan PAD Lainnya Ket : Tingkat capaian Keuangan 93.50 % dikarenakan adanya penyesuaian belanja jasa kantor, dan makan dan minum rapat serta perjalanan dinas	141,433,500.00	132,233,744	(9,199,756.00)	93.50	100.00
50	Evaluasi Pengelolaan Baang – Barang Berharga	106,736,500.00	101,616,840	(5,119,660.00)	95.20	100.00
51	Monitoring dan evaluasi Data Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang	78,550,000.00	76,038,000	(2,512,000.00)	96.80	100.00
52	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Retribusi Daerah dan Benda-benda Berharga (Barang Kuasi) Ket : Tingkat capaian Keuangan 91.90 % dikarenakan adanya penyesuaian belanja jasa kantor, dan makan dan minum rapat serta perjalanan dinas	72,329,000.00	66,535,500	(5,793,500.00)	91.99	100.00
53	Pendataan, Penagihan pajak Kendaraan Bermotor UPTB. Wil. Makassar II	112,074,000.00	111,954,000	(120,000.00)	99.89	100.00
54	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Makassar II Utara	388,139,000.00	373,932,000	(14,207,000.00)	96.34	100.00
55	Penyusunan Pembahasan Ranperda di Bidang Pendapatan	143,881,250.00	143,752,016	(129,234.00)	99.91	100.00
56	Workshop/Sosialisasi Ranperda/Perda di Bidang Pendapatan Ket : Tingkat capaian Keuangan 91.72 % dikarenakan adanya penyesuaian tingkat pendidikan terhadap kebutuhan Instruktur/Tenga Ahli Non PNS	223,280,000.00	204,788,529	(18,491,471.00)	91.72	100.00

57	Rekonsiliasi data serta Penatausahaan Penerimaan dan Tunggakan Pajak Air Permukaan dan PBBKB Ket : Tingkat capaian Keuangan 85,05 % dikarenakan adanya penyesuaian belanja jasa kantor, dan makan dan minum rapat serta perjalanan dinas	117,701,500.00	100,107,520	(17,593,980.00)	85.05	100.00
58	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Toraja Utara	383,139,000.00	378,356,000	(4,783,000.00)	98.75	100.00
59	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Luwu Utara	383,139,000.00	377,029,000	(6,110,000.00)	98.41	100.00
60	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Bantaeng	383,189,000.00	376,547,000	(6,642,000.00)	98.27	100.00
61	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Enrekang	368,139,000.00	353,407,000	(14,732,000.00)	96.00	100.00
62	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Pinrang	385,539,000.00	378,339,000	(7,200,000.00)	98.13	100.00
63	Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan Subjek/Objek Pajak Daerah	103,294,500.00	102,689,000	(605,500.00)	99.41	100.00
64	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Luwu Ket : Tingkat capaian Keuangan 81.56 % dikarenakan adanya penyesuaian tingkat pendidikan terhadap kebutuhan Instruktur/Tenga Ahli Non PNS	417,351,000.00	340,409,000	(76,942,000.00)	81.56	100.00
65	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Sidrap	383,014,000.00	372,187,000	(10,827,000.00)	97.17	100.00
66	Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah	307,973,250.00	305,721,219	(2,252,031.00)	99.27	100.00
67	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Tana Toraja	378,139,000.00	365,801,500	(12,337,500.00)	96.74	100.00
68	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Soppeng	376,639,000.00	372,719,000	(3,920,000.00)	98.96	100.00
69	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional	44,675,000.00	43,602,200	(1,072,800.00)	97.60	100.00
70	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Bulukumba	458,049,000.00	440,358,000	(17,691,000.00)	96.14	100.00
71	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Pangkep	683,139,000.00	676,055,300	(7,083,700.00)	98.96	100.00
72	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wil. Sinjai	457,810,000.00	451,810,000	(6,000,000.00)	98.69	100.00
73	Verifikasi, Analisa dan Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang	91,839,500.00	88,529,261	(3,310,239.00)	96.40	100.00

<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Aksebilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Daerah</b>	<b>666,146,000.00</b>	<b>663,159,503.00</b>	<b>(2,986,497.00)</b>	<b>99.55</b>	<b>100.00</b>
1	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Unggulan Samsat Prov. Sul Sel	329,074,000.00	327,326,927	(1,747,073.00)	99.47	100.00
2	Pengelolaan Website Badan Pendapatan Daerah Prov. Sul Sel	10,000,000.00	10,000,000	-	100.00	100.00
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Layanan Unggulan Samsat	327,072,000.00	325,832,576	(1,239,424.00)	99.62	100.00

## **2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Terdapat saldo anggaran senilai Rp.2.860.298.463,44. Secara umum saldo anggaran berasal dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berasal dari belanja cetak & penggandaan, makan minum yang disesuaikan dengan volume kegiatan yang dilaksanakan serta belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan .

Secara umum pada pelaksanaan program dan kegiatan tidak dijumpai adanya hambatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa target tercapai.

## **BAB III**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

#### **3.1 Rincian Pos-pos Laporan Keuangan**

##### **3.1.1 Laporan Realisasi Anggaran**

<b>A. Pendapatan .....</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
	<b>3.762.403.432.859,00</b>	<b>3.794.401.227.965,85</b>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

Target Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp 3.762.403.432.859,00 dengan realisasi senilai Rp.3.794.401.227.965,85 atau 100,85 % dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>2017</b>
1	Pajak Daerah	3,462,102,500,000.00	3,462,184,656,928.00	3,241,746,521,290.00
2	Retribusi Daerah	154,530,000.00	166,305,200.00	134,700,000.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	109,489,402,859.00	108,949,315,359.00	127,005,994,838.83
4	Lain-lain PAD yang sah	185,472,000,000.00	217,915,950,478.85	111,392,178,843.42
5	Pendapatan Hibah	5,185,000,000.00	5,185,000,000.00	6,019,709,790.00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.762.403.432.859,00</b>	<b>3.794.401.227.965,85</b>	<b>3.486.299.104.762,25</b>

<b>A.1. Pajak Daerah.....</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
	<b>3.462.102.500.000,00</b>	<b>3.462.184.656.928,00</b>

Target penerimaan pajak daerah senilai Rp.3.462.102.500.00,00 dapat direalisasikan Rp.3.462.184.656.928,00 atau 100,00 % Surplus dari target dari target sebesar Rp.82.156.928,00. Realisasi tersebut meningkat 6,80 % dari realisasi Tahun 2017 sebesar Rp.3.241.746.521.290,00

Pajak Daerah terdiri dari:

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	2017
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1,195,598,000,000	1,242,314,483,837	1,103,139,264,509
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	987,912,000,000	901,224,678,479	942,823,987,093
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	619,639,647,000	634,138,302,944	563,111,539,483
4	Pajak Air Permukaan	98,952,853,000	99,273,770,342	85,252,081,608
5	Pajak Rokok	560,000,000,000	585,233,421,326	547,419,648,597
<b>Jumlah</b>		<b>3,462,102,500,000</b>	<b>3,462.184.656.928</b>	<b>3,241.746.521.290</b>

<b>A.2 Retribusi Daerah .....</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
	<b>154.530.000,00</b>	<b>166.305.200,00</b>

Target penerimaan Retribusi Daerah senilai Rp.154.530.000,00 dapat direalisir sebesar Rp 166.305.200,00 atau 117,75 %. Realisasi tersebut meningkat 23,46 % dari realisasi Tahun 2017 sebesar Rp.31.605.200,00 Retribusi daerah berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan rincian:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	2017
1	Rumah Dinas	16,260,000	14,780,000	13,200,000
2	Kantin Kantor pusat Pettarani	1,800,000	1,200,000	1,200,000
3	Kantin Pegawai samsat Makassar	2,010,000	2,010,000	1,680,000
4	Kantin samsat Makassar	7,200,000	7,200,000	7,200,000
5	Kantin Samsat Gowa	2,880,000	4,290,000	2,880,000
6	Kantin Samsat Bone	720,000	720,000	720,000
7	Kantin Samsat Takalar	1,200,000	1,500,000	1,200,000
8	Kantin Samsat Maros	0,00	0,00	0,00
9	Koperasi Pusat pettarani	7,200,000	7,200,000	4,800,000
10	Koperasi Samsat Makassar	4,380,000	4,440,000	4,440,000
11	Koperasi Samsat Bulukumba	0,00	7,650,000	0,00

12	Kantor Kas bank sulselbar Pettarani	58,500,000	58,500,000	58,500,000
13	Kantor Kas bank sulselbar Samsat Makassar	36,000,000	36,000,000	36,000,000
14	Kantor Kas bank sulselbar Samsat Gowa	13,500,000	13,500,000	0
15	Lahan ATM Bank Sulselbar Samsat Makassar II	2,880,000	7,315,200	2,880,000
	<b>Jumlah</b>	<b>154,530,000</b>	<b>166,305,200</b>	<b>134,700,000</b>

A.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....	Anggaran	Realisasi
	<b>109.489.402.859,00</b>	<b>108.949.315.359,00</b>

Target penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp 109.489.402.859 dapat direalisir senilai Rp108.949.315.359,00 atau 99,50 % dan terdapat sisa sebesar Rp.540.087.500,00 Adapun rincian penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:

No	Jenis Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran	Realisasi	2017
1	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (Perusda Sulawesi Selatan)	630,884,500	90,797,000	346,108,342.00
2	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah (Bank SulSelBar)	107,522,132,287	107,522,132,287	125,249,267,986.83
3	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta			
1	PT KIMA	510,232,670	510,232,670	406,383,969.00
2	PT GMTD	211,200,000	211,200,000	330,000,000.00
3	PT ASKRIDA	614,953,402	614,953,402	674,234,541.00
	<b>Jumlah</b>	<b>109,489,402,859</b>	<b>108,949,315,359</b>	<b>127,005,994,838.83</b>

<b>A.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .....</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
	<b>185.472.000.000,00</b>	<b>217.915.950.478,85</b>

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp.185.472.000.000,00 dapat direalisir senilai Rp.217.915.950.478,85 atau 117,49 % Realisasi tersebut naik 95,63 % dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.111.392.178.843,42 Rincian penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai berikut:

No	Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran	Realisasi	2017
1	Penerimaan Jasa Giro	50,000,000,000	28,351,485,679.42	40,052,535,174.77
2	Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)	0.00	7,499,659,208.92	9,900,137,992.22
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	2,175,145,950.00	693,525,664.00
4	Pendapatan Denda Pajak	51,972,000,000	61,455,861,768.00	47,112,488,824.00
5	Pendapatan dari Pengembalian	83,500,000,000	118,000,854,193.51	12,175,431,293.43
6	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum/Lain-lain Penerimaan yang sah	0.00	432,943,679.00	1,458,059,895.00
	<b>Jumlah</b>	<b>185,472,000,000</b>	<b>217,915,950,478.85</b>	<b>111,392,178,843.42</b>

<b>A.5 Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta –</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
	<b>5.185.000.000,00</b>	<b>5.185.000.000,00</b>

Target penerimaan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta senilai Rp. 5.185.000.000,00 dapat direalisir senilai Rp.5.185.000.000,00 atau 100,00 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Badan Usaha	Anggaran	Realisasi	2017
1	PT Semen Tonasa	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,999,950,000.00
2	PT Jasa Raharja	3,960,000,000.00	3,960,000,000.00	3,769,800,000.00
3	PT Pelindo IV	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00
4	PT Lintas Arta	0.00		24,959,790.00
	<b>Jumlah</b>	<b>5,185,000,000.00</b>	<b>5,185,000,000.00</b>	<b>6,019,709,790.00</b>

## B. Belanja

Belanja adalah semua Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan sebesar Rp. 207.182.570.628,44 dengan realisasi Rp.183.824.715.385,00 atau 88.73 %. Terdapat sisa anggrana Rp. 23.357.855.243,44 Belanja tersebut dapat diuraikan menurut rincian/kelompok belanja sebagai berikut:

<b>B.1 Belanja Pegawai .....</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
	<b>129.077.274.528,00</b>	<b>108.579.717.748,00</b>

Belanja Pegawai di rencanakan sebesar Rp.129.077.274.528,00 dapat terealisasi sebesar Rp.108.579.717.748,00 atau 84.12 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 20.497.550.800,00 atau 15.88 %. Adapun rincian belanja pegawai sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	2017
1	Gaji & Tunjangan	28,301,809,118	26,686,799,090	26,676,828,713
2	Tambahan Penghasilan PNS	4,524,002,910	4,331,000,000	9,599,752,683
3	Insentif Pemungutan Pajak	96,251,462,500	77,561,918,658	98,102,773,471
4	Belanja Pegawai	-	-	3,884,225,000
	<b>Jumlah</b>	<b>129,077,274,528</b>	<b>108,579,717,748</b>	<b>138,263,579,867</b>

Jumlah anggaran belanja pegawai yang dialokasikan pada belanja tidak langsung sebesar Rp.129.077.274.528,00 yang terdiri dari :

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Gaji dan Tunjangan       | Rp 28,301,809,118,00         |
| 2. Tambahan Penghasilan PNS | Rp 4,524,002,910,00          |
| 3. Insentif Pungutan Pajak  | Rp 96,251,462,500,00         |
|                             | <b>Rp 129,077,274,528,00</b> |

Dari anggaran Belanja Tidak Langsung tersebut diatas, telah terealisasi sebesar Rp. 108.579.718.748,00 atau sebesar 84,12 % dengan sisa dana sebesar Rp. 20.497.550.800,00 berasal dari sisa accres 2,5% untuk mengantisipasi kenaikan pangkat, mutasi PNS, serta tidak terealisasinya insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV.

<b>B.2 Belanja Barang dan Jasa ....</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
	<b>61.263.179.600,44</b>	<b>58.568.191.787,00</b>

Belanja Barang dan Jasa di rencanakan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.61.263.179.600,44 dapat terealisasi sebesar Rp.58.568.191.787,00 atau 95,60 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.694.987.813,44 atau 4,40 %. Adapun rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	2017
1	Belanja Bahan Pakai Habis	7,164,832,400.00	6,992,165,820	6,445,690,655
2	Belanja Bahan /Material	2,000,000.00	2,000,000	0
3	Belanja Jasa Kantor	19,487,394,000.00	18,634,075,581	14,283,420,572
4	Belanja Premi Asuransi	400,000,000.00	361,414,144	337,678,085
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,087,650,000.0	1,053,403,045	1,156,073,475
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,504,556,650.00	10,155,166,200	8,667,320,300
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	1,510,000,000.00	1,345,010,000	1,528,000,000
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000.00	5,000,000	5,000,000
9	Belanja Makanan & Minuman	4,895,505,000.00	4,716,263,400	4,130,049,000
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	692,900,000.00	688,163,000	314,932,000
11	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	776,950,000.00	675,457,000	491,540,000
12	Belanja Perjalanan Dinas	5,571,744,000.00	5,459,640,247	6,414,388,240
13	Belanja Kursus, Pelatihan	307,750,000.00	250,700,000	1,053,283,000
14	Belanja Pemeliharaan	6,491,807,550.44	6,255,145,350	3,081,931,000
15	Belanja Jasa Konsultasi	2,365,090,000.00	1,974,588,000	2,034,842,000
	<b>Jumlah</b>	<b>61,263,179,600,44</b>	<b>58,568,191,787</b>	<b>49,944,148,327</b>

<b>B.3 Belanja Modal .....</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
	<b>16.842.116.500,00</b>	<b>16.676.805.850,00</b>

Belanja Modal di rencanakan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 16.842.116.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp.16.676.805.000,00 atau 99.02 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 165.310.650,00 atau 0,98 %. Adapun rincian belanja modal sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>2017</b>
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	392,611,500	390,061,500	1,043,050,000
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel	417,600,000	402,700,000	74,000,000.00
3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,322,750,000	1,320,250,000	1,324,650,000
4	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	837,000,000	823,000,000.00	1,664,150,000
5	Belanja Modal Pengadaan Komputer.	3,026,250,000	2,963,097,600	3,233,730,000
6	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	529,450,000	529,450,000	889,925,000
7	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8,000,000	8,000,000	54,450,000
8	Belanja Modal Pengadaan Penghias R. Rumah Tangga	199,050,000	198,343,750	395,970,000
9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30,000,000	30,000,000	185,750,000
10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi.	231,200,000	228,200,000	161,430,000
11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik & Telepon	192,350,000	171,662,000	256,723,900
12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pemb.Bangunan	7,407,355,000	7,376,074,000	8,190,405,000
13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0.00	0.00	50,000,000
14	Belanja Modal Aset Lainnya	1,065,500,000	1,062,159,000	65,720,000
15	Belanja Modal Pengadaan/ konstruksi/bangunan/alat-alat informasi	1,183,000,000	1,173,808,000	1,239,622,000
16	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air	0.00	0.00	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>16,842,116,500</b>	<b>16,676,805,850</b>	<b>18,829,575,900</b>

### 3.1.2 Laporan Operasional

A. Pendapatan.....	2018	2017
	<b>3.694.677.666.448,85</b>	<b>3.548.072.500.708,33</b>

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan tersebut diperoleh dan dipungut oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.3.803.263.839.591,85 dengan rincian sebagai berikut:

A.1 Pajak Daerah.....	2018	2017
	<b>3.464.590.262.198,00</b>	<b>3.248.772.826.356,00</b>

Pendapatan-LO dari pajak daerah senilai

Rp.3.464.590.262.198,00. Pajak Daerah terdiri dari:

No	Jenis Pajak Daerah	2018	2017
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1,242,740,478,475.00	1,101,891,558,484.00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	901,224,678,479.00	942,823,987,093.00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	636,362,009,594.00	570,509,378,678.00
4	Pajak Air Permukaan	98,029,674,324.00	85,710,737,993.00
5	Pajak Rokok	585,233,421,326.00	547,419,648,597.00
Jumlah		<b>3,464,590,262,198.00</b>	<b>3,248,772,826,356.00</b>

A.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	2018	2017
	<b>1.242.740.478.475,00</b>	<b>1.101.891.558.484,00</b>

Pendapatan pajak kendaraan bermotor berasal dari pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun 2018 yang jatuh tempo pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening	2018	2017
1	A-1 Sedan,Jeep,Station Wagon (Pribadi)	674,658,133,704	588,063,839,940
2	A-2 Sedan,Jeep,Station Wagon (Umum)	9,640,661,884	10,694,830,845
3	B-1 Bus,Microbus (Pribadi)	2,220,877,025	1,811,533,126
4	B-2 Bus,Microbus (Umum)	2,267,346,325	1,827,150,145
5	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	210,219,343,864	187,005,508,005
6	C-2 Truck, Pickup (Umum)	29,424,302,706	28,099,094,696
7	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	4,704,116,720	4,684,450,677
8	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0.00	0.00
9	E-1 Sepeda Motor, Scooter	299,274,186,504	270,288,210,517
10	A-3 Sedan,Jeep,Station Wagon (Dinas)	5,792,079,525	5,246,036,000
11	B-3 Bus,Microbus (Dinas)	331,485,225	307,565,950
12	C-3 Truck, Pickup (Dinas)	2,294,231,325	2,143,152,275
13	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	290,849,168	231,082,308
14	E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	1,622,864,500	1,489,104,000
<b>Total</b>		<b>1,242,740,478,475</b>	<b>1,101,891,558,484</b>

A.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor..	2018	2017
	<b>901.224.678.479,00</b>	<b>942.823.987.093,00</b>

Pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pendapatan atas kendaraan yang terdaftar pada tahun anggaran 2018. PAD dari BBNKB merupakan pendapatan yang tidak didahului dengan penetapan. Penetapan dilaksanakan bersamaan dengan proses pembayaran (*official assesment*). Pendapatan BBNKB senilai Rp. 901,224,678,479.00 dengan rincian BBNKB sebagai berikut:

No	Keterangan	2018	2017
1	A-1 sedan, jeep, Station Wangon (p)	439,858,255,082	480,064,683,090
2	A-2 sedan, jeep, Station Wangon (u)	306,456,750	439,388,000
3	B-1 Bus, Microbus (p)	1,899,680,000	1,638,505,000
4	B-2 Bus, Microbus (u)	1,384,885,000	1,479,202,500

5	C-1 Truck, Pickup (p)	129,995,865,435	116,713,928,000
6	C-2 Truck, Pickup (u)	10,980,702,000	16,234,721,000
7	D-1 Kendaraan khusus (p)	1,230,128,237	1,101,066,943
8	D-2 Kendaraan khusus (u)	0.00	0.00
9	E Sepeda motor (u)	295,222,776,100	299,600,011,800
10	A-3 sedan, jeep, Station Wangon (d)	11,035,730,000	13,247,080,000
11	B-3 Bus, Microbus (d)	834,970,000	1,124,050,000
12	C-3 Truck, Pickup (d)	4,680,585,500	6,123,210,000
13	D-3 Kendaraan khusus (d)	22,819,875	57,834,260
14	E-3 Sepeda motor (d)	3,771,824,500	5,000,306,500
	<b>Jumlah</b>	<b>901,224,678,479</b>	<b>942,823,987,093</b>

#### A.1.3 Pajak Bahan Bakar....

<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>636.062.066.988,00</b>	<b>570.509.378.678,00</b>

Pendapatan pajak bahan bakar merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. PAD dari PBB merupakan pendapatan yang tidak didahului dengan penetapan. Pendapatan PBB didasarkan pada Surat Pemberitahun Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pungut (*self assesment*). Adapun SPTPD untuk masa pajak 2018 senilai Rp. 636.062.066.988,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis BBM	LRA 2018	Piutang 2017	Piutang 2018	Jumlah
1	2	3	4	5	6 (3-4+5)
1	Bensin/Premium	219,080,852,613	17,267,822,354	18,546,078,428	220,359,108,687
2	Pertamax/Premix	32,014,272,436	2,785,208,625	2,686,042,821	31,915,106,632
3	Pertamax Plus		0		0
4	Solar	82,441,843,724	10,578,082,701	3,717,571,322	75,581,332,345
5	Pertalite	191,418,748,078	16,902,811,067	17,838,130,333	192,354,067,344
6	Pertamina Dex	699,299,121	60,093,488	70,489,775	709,695,408
7	Bio Diesel	520,514,415	42,163,862	102,720,844	581,071,397
8	Bio Solar	105,013,002,710	5,716,051,069	12,317,006,302	111,613,957,943
9	Pertamax Turbo	384,319,161	21,548,936	41,323,406	404,093,631
10	Dexlite	2,565,450,686	130,295,768	408,421,289	2,843,576,207
	<b>Jumlah</b>	<b>634,138,302,944</b>	<b>53,504,077,870</b>	<b>55,727,784,520</b>	<b>636,362,009,594</b>

A.1.4 Pajak Air Permukaan .	2018	2017
	<b>99.029.674.324,00</b>	<b>86.129.253.504,00</b>

Pendapatan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. PAD dari PAP merupakan pendapatan yang didahului dengan penetapan (*official assesment*). Pendapatan pajak air permukaan senilai Rp.99.029.674.324,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	UPTB	2018	2017
1	Makassar	1.898.114.446,00	1,968,129,644.00
2	Gowa	1.009.441.469,00	1,121,282,215.00
3	Bone	44.905.811,00	39,775,172.00
4	Parepare	50.740.182,00	54,236,232.00
5	Palopo	335.522.528,00	326,425,028.00
6	Luwu	562.341.086,00	412,558,959.00
7	Baru	24.917.361,00	16,670,311.00
8	Maros	95.713.567,00	74,433,951.00
9	Sinjai	428.117.871,00	523,700,247.00
10	Wajo	148.126.281,00	150,403,238.00
11	Bantaeng	202.274.190,00	178,311,806.00
12	Jenepono	13.180.759,00	20,007,199.00
13	Takalar	116.421.502,00	75,854,334.00
14	Pinrang	7.411.067.883,00	10,431,159,802.00
15	Pangkep	84.486.340,00	106,127,157.00
16	Sidrap	26.013.600,00	8,497,496.00
17	Enrekang	214.182.243,00	227,003,168.00
18	Tator	570.209.322,00	616,719,554.00
19	Luwu Timur	85.683.205.867,00	69,676,253,401.00
20	Luwu Utara	28.408.584,00	24,806,930.00
21	Soppeng	22.775.947,00	17,988,631.00
22	Bulukumba	11.905.166,00	11,854,202.00
23	Selayar	14.864.048,00	14,197,827.00
24	Toraja Utara	32.738.271,00	32,857,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>99.029.674.324,00</b>	<b>86.129.253.504,00</b>

A.1.5 Pajak Rokok .....	2018	2017
	585.233.421.326,00	547.419.648.597,00

Pendapatan rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. PAD dari Pajak Rokok merupakan PAD tanpa penetapan terlebih dahulu. Pendapatan pajak rokok tahun 2018 senilai Rp.585.233.421.326,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Masa Pajak	LRA 2018	Piutang 2017	2018	2017
1	2	3	4	5 (3-4)	
1	Triwulan IV 2017 (Desember)	159,297,918,284	0,00	159,297,918,284	162,177,393,828
2	Kekurangan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Triwulan I 2018	25,167,093,129	0,00	25,167,093,129	18,278,899,432
4	Triwulan II 2018	148,552,830,020	0,00	148,552,830,020	137,143,462,621
5	Triwulan III 2018	86,647,591,778	0,00	86,647,591,778	127,552,368,240
6	Triwulan IV 2018 (Okt-Nov)	165,567,988,115	0,00	165,567,988,115	102,267,524,476
7	Triwulan IV 2018 (Desember)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	585,233,421,326	0,00	585,233,421,326	547,419,648,597

sampai dengan penyusunan laporan keuangan 2018, Data penetapan pajak rokok Desember 2018 belum ditetapkan pemerintah.

A.2 Retribusi Daerah.....	2018	2017
	165.105.200,00	135.900.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan retribusi dari pemakaian kekayaan daerah dengan senilai Rp.165.105.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>LRA 2018</b>	<b>PIUTANG 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5(3-4)</b>	<b>6</b>
1	Rumah Dinas	14,780,000	0.00	14,780,000	13,200,000
2	Kantin Kantor pusat Pettarani	1,200,000	0.00	1,200,000	1,200,000
3	Kantin Pegawai samsat Makassar	2,010,000	0.00	2,010,000	1,680,000
4	Kantin samsat Makassar	7,200,000	0.00	7,200,000	7,200,000
5	Kantin Samsat Gowa	4,290,000	0.00	4,290,000	2,880,000
6	Kantin Samsat Bone	720,000	0.00	720,000	720,000
7	Kantin Samsat Takalar	1,500,000	0.00	1,500,000	1,200,000
8	Koperasi Pusat pettarani	7,200,000	1,200,000	6,000,000	4,800,000
9	Koperasi Samsat Makassar	4,440,000	0.00	4,440,000	5,640,000
10	Koperasi Samsat Bulukumba	7,650,000	0.00	7,650,000	0.00
11	Kantor Kas Bank Sulselbar Pettarani	58,500,000	0.00	58,500,000	58,500,000
12	Kantor Kas Bank Sulselbar Samsat Makassar	36,000,000	0.00	36,000,000	36,000,000
13	Lahan ATM Bank Sulselbar Samsat Makassar	0.00	0.00	0.00	2,880,000
14	Kantor Kas bank sulselbar Samsat Gowa	13,500,000	0.00	13,500,000	0.00
15	Lahan ATM Bank Sulselbar Samsat Makassar II	7,315,200	0.00	7,315,200	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>158,990,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>165,105,200</b>	<b>135,900,000</b>

<b>A.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>195.738.689.087,33</b>	<b>182.007.196.164,91</b>

Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp.195.738.689.087,33. PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD tanpa penetapan. Adapun rincian penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:

No	Jenis Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2018	2017
1	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (Perusda Sulawesi Selatan)	0,00	629.891.532,31
2	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah (Bank SulSelBar)	180.281.261.872,93	175.193.726.604,90
3	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta 1 PT KIMA 2 PT GMTD 3 PT ASKRIDA	14.631.273.812,40 211.200.000,00 614.953.402,00	5.179.343.486,70 330.000.000,00 674.234.541,00
	<b>Jumlah</b>	<b>195.738.689.087,33</b>	<b>182.007.196.164,91</b>

A.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .....	2018	2017
	<b>217.676.406.978,85</b>	<b>111.136.868.397,42</b>

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp. 217.676.406.978,85. PAD dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD tanpa penetapan terlebih dahulu. pendapatan yang didahului dengan penetapan. Rincian penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai berikut:

No	Jenis Lain-lain PAD yang Sah	2018	2017
1	Penerimaan Jasa Giro	28.307.456.399,42	40.053.253.728,77
2	Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)	7.270.540.708,92	9.885.737.992,22
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.175.145.950,00	693.525.664,00
4	Pendapatan Denda Pajak	61.455.861.768,00	47.112.488.824,00
5	Pendapatan dari Pengembalian	118.044.458.473,51	11.933.802.293,43

7	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum/Lain- lain Penerimaan yang sah	422.943.679,00	1.458.059.895,00
	<b>Jumlah</b>	<b>217.676.406.978,85</b>	<b>111.136.868.397,42</b>

A.5 Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta	2018	2017
	<b>11.407.399.670,00</b>	<b>6.019.709.790,00</b>

PAD dari hibah merupakan PAD tanpa penetapan terlebih dahulu. Pendapatan hibah diakui pada saat terealisasinya pendapatan hibah. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta senilai Rp.11.407.399.670,00 dengan rincian:

A.5.1. Hibah Pemerintah.	2018	2017
	<b>6.222.399.670,00</b>	<b>0,00</b>

PAD dari hibah merupakan PAD tanpa penetapan terlebih dahulu. Pendapatan hibah diakui pada saat terealisasinya pendapatan hibah. Pendapatan Hibah dari Pemerintah senilai Rp. 6.222.399.670,00 dengan rincian:

No	Keterangan	Jenis	2018	2017
1	Pemkab Sidrap	Aset/Tanah	2.908.807.150	0,00
2	Pemkab Jeneponto	Aset/Tanah	360.000.000	0,00
3	Pemkab Gowa	Aset/Tanah	2.953.592.520	0,00
4	DSDA- CKTR	Aset/Tanah		0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>6.222.399.670</b>	<b>0,00</b>

A.5.1. Hibah Bdan/ Lembaga/ Organisasi Swasta.....	2018	2017
	<b>5.185.000.000</b>	<b>6.019.709.790</b>

PAD dari hibah merupakan PAD tanpa penetapan terlebih dahulu. Pendapatan hibah diakui pada saat terealisasinya pendapatan hibah. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta senilai Rp.5.185.000.000,00 dengan rincian:

No	Keterangan	Jenis	2018	2017
1	PT Semen Tonasa	Kas/Tunai	1.000.000.000	1.999.950.000
2	PT Jasa Raharja	Kas/Tunai	3.960.000.000	3.769.800.000

3	PT Pelindo IV	Kas/Tunai	225,000,000	225,000,000
4	PT Lintas Arta	Kas/Tunai	0.00	24,959,790
	<b>Jumlah</b>		<b>5,185,000,000</b>	<b>6,019,709,790</b>

B. Beban .....	2018	2017
	<b>194.852.075.070,66</b>	<b>174.688.628.295,59</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban tahun 2018 senilai Rp.194.852.075.070,66 dengan rincian sebagai berikut:

B.1. Beban Operasional .....	2018	2017
	<b>194.852.075.070,66</b>	<b>174.688.628.295,59</b>

Beban operasional adalah beban dari kegiatan rutin pelayanan pemerintah daerah. Beban operasional dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Beban operasional tahun 2018 senilai Rp.194.852.075.070,66 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Beban Operasional	2018	2017
1	Beban pegawai	126.547.354.188,00	116.850.431.440,00
2	Beban persediaan	21.426.370.039,00	19.053.774.013,00
3	Beban jasa	25.657.605.490,00	21.764.722.622,00
4	Beban pemeliharaan	6.255.145.350,00	2.786.750.000,00
5	Beban perjalanan dinas	5.459.640.247,00	6.414.388.240,00
6	Beban penyusutan	8.809.094.512,00	7.444.319.054,00
7	Beban Lain-lain	696.865.244,66	374.242.926,59
	<b>Jumlah</b>	<b>194.852.075.070,66</b>	<b>174.688.628.295,59</b>

B.1.1 Beban Pegawai .....	2018	2017
	<b>126.547.354.188,00</b>	<b>116.850.431.440,00</b>

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai berupa uang yang harus dibayarkan kepada aparat sipil Negara, pejabat Negara. Beban melalui

mekanisme UP/GU/TU diakui pada saat pembayaran telah disahkan oleh Pengguna Anggaran. Beban melalui mekanisme LS diakui pada saat terbitnya SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai berasal dari belanja tidak langsung senilai Rp. 126.547.354.188,00 dan tagihan atas beban pegawai tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LRA 2018	Utang 2017	Utang 2018	2018	2017
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7
1	Gaji & Tunjangan	26,686,805,070	0.00	5,547,614	26,692,346,704	25,962,888,514
2	Tambahan Penghasilan PNS	4,331,000,000	0.00	0.00	4,331,000,000	9,599,752,683
3	Insentif Pemungutan Pajak	77,561,918,658	15,915,506,799	33,877,595,625	95,524,007,484	76,700,638,904
4	Kekurangan Gaji Berkala	0.00	0.00	0.00	0.00	10,758,500
5	Kekurangan Tunjangan Beras	0.00	0.00	0.00	0.00	255,360
6	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian	0.00	0.00	0.00	0.00	97,979,576
7	Iuran Askes	0.00	0.00	0.00	0.00	593,932,903
8	Belanja Langsung Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884,225,000
	<b>Jumlah</b>	<b>108,579,723,728</b>	<b>15,915,512,779</b>	<b>33,877,595,625</b>	<b>126,547,354,188</b>	<b>116,850,431,440</b>

Sedangkan utang beban pegawai 2018 yaitu Utang Gaji dan Tunjangan Pegawai Rp. 5.547.614,00 dan insentif pemungutan pajak daerah untuk Triwulan IV tahun 2018 (Oktober, November, dan Desember) senilai Rp. 33.877.595.625,00.

B.1.2 Beban Persediaan .....	2018	2017
	<b>21.426.370.039,00</b>	<b>19.053.774.013,00</b>

Beban persediaan adalah beban atas pemakaian persediaan (*use of goods*). Beban persediaan Tahun 2018 senilai Rp. 21.426.370.039,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Persediaan Awal	Realisasi LRA 2018	Persediaan Akhir*	Beban Persediaan 2018	Beban Persediaan 2017
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7
1	Alat Tulis Kantor	227,270,500	3,990,115,500	191,985,688	4,025,400,312	3,892,250,500
2	Alat listrik dan elektronik	0	268,755,800	0	268,755,800	191,459,900
3	Perangko, Materai, dan benda pos lainnya	0	7,498,000	0	7,498,000	10,164,000
4	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0	440,327,420	0	440,327,420	282,116,600
5	Bahan Bakar Minyak/Gas	0	2,230,969,100	0	2,230,969,100	1,959,808,455
6	Tabung pemadam kebakaran	0		0	0	10,000,000
7	Obat Obatan	0	2,000,000	0	2,000,000	0
8	Souvenir & cenderamata	0	54,500,000	0	54,500,000	53,500,000
9	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	0	543,873,058	0	543,873,058	541,048,000
10	Bahan Cetakan	1,112,261,800	8,904,366,400	879,845,251	9,136,782,949	7,983,377,558
11	Makan-minum	0	4,716,263,400	0	4,716,263,400	4,130,049,000
	<b>TOTAL</b>	<b>1,339,532,300</b>	<b>21,158,668,678</b>	<b>1,071,830,939</b>	<b>21,426,370,039</b>	<b>19,053,774,013</b>

\*Hasil rekapitulasi Badan dan UPTB

B.1.3 Beban Jasa.....	2018	2017
	<b>25.657.605.490,00</b>	<b>21.764.722.622,00</b>

Beban jasa Tahun 2018 senilai Rp. 25.657.605.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi LRA	Utang 2017	Utang 2018	Kapitalisasi Aset	Beban Jasa 2018	2017
1	2	3	5	6	7	8 (3+4-5+6-7)	9
1	Belanja Jasa Kantor	18.634.075.581	389.915.718	422.783.696	70.000.000	18.596.943.559	14.272.800.762
2	Belanja Premi Asuransi	361.414.144	0.00	0.00	0.00	361.414.144	337.678.085
3	Belanja Perawatan kendaraan bermotor	509.529.987	0.00	0.00	0.00	509.529.987	615.025.475
4	Belanja Penggandaan	1.250.799.800	0.00	0.00	0.00	1.250.799.800	1.081.321.300
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang	1.345.010.000	0.00	0.00	0.00	1.345.010.000	1.558.300.000
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000	0.00	0.00	0.00	5.000.000	5.000.000
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	688.163.000	0.00	0.00	0.00	688.163.000	314.923.000
8	Belanja Pakaian khusu dan hari-hari tertentu	675.457.000	0.00	0.00	0.00	675.457.000	491.549.000
9	Belanja Kursus, Pelatihan	250.700.000	0.00	0.00	0.00	250.700.000	1.053.283.000

10	Belanja Jasa Konsultasi	1.974.588.000	0.00	0.00		1.974.588.000	2.034.842.000
	Jumlah	25.694.737.512	389.915.718	420.504.509	70.000.000	25.657.605.490	21.764.722.622

B.1.4 Beban Pemeliharaan..	-	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>6.255.145.350,00</b>	<b>2.786.750.000,00</b>

Beban pemeliharaan Tahun 2018 senilai Rp.6.255.145.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2018	2017
1	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin	665.513.500	1.255.177.000
2	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5.378.109.850	1.274.937.000
3	Belanja pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.197.000	84.811.000
4	Belanja pemeliharaan Aset Lainnya	149.325.000	171.825.000
	<b>Jumlah</b>	<b>6.255.145.350</b>	<b>2.786.750.000</b>

B.1.5 Beban Perjalanan Dinas .....	-	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>5.459.640.247,00</b>	<b>6.414.388.240,00</b>

Beban perjalanan dinas Tahun 2018 senilai Rp.5.459.640.247,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2018	2017
1	Perjalanan dinas dalam daerah	4.022.368.357	4.535.674.550
2	Perjalanan dinas luar daerah	1.437.271.890	1.878.713.690
	<b>Jumlah</b>	<b>5.459.640.247</b>	<b>6.414.388.240</b>

B.1.6 Beban Penyusutan .....	-	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>8.809.094.500,00</b>	<b>7.444.319.054,00</b>

Beban penyusutan tahun 2018 senilai Rp.8.809.094.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2017	2017
1	Peralatan dan Mesin	7,846,834,222	6,685,485,011
2	Gedung dan Bangunan	917,751,824	720,114,495
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	44,508,454	38,719,548
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8,809,094,500</b>	<b>7,444,319,054</b>

B.1.7 Beban Lain-lain .....	2018	2017
	<b>696.865.244,66</b>	<b>374.242.926,59</b>

Beban lain-lain Tahun 2018 senilai Rp.696.865.244,66 merupakan beban penyisihan piutang dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Masa Tunggakan	Umur Piutang	Presensi Penyisihan	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang	Beban Penyisihan 2018
1	3	4	5	6	7	8=6x7	9
<b>PIUTANG PAJAK BAHAN BAKAR</b>							
	Premium	2018	< 1 Tahun	0.5%	18,546,078,428.00	92,730,392.14	92,730,392.14
	Pertamax	2018	< 1 Tahun	0.5%	2,686,042,821.00	13,430,214.11	13,430,214.11
	Solar	2018	< 1 Tahun	0.5%	3,717,571,322.00	19,877,556.53	19,877,556.53
	Pertamax Dex	2018	< 1 Tahun	0.5%	17,838,130,333.00	89,190,651.67	89,190,651.67
	Pertalite	2018	< 1 Tahun	0.5%	70,489,775.00	352,448.88	352,448.88
	Bio Diesel	2018	< 1 Tahun	0.5%	12,713,006,302.00	61,585,031.51	61,585,031.51
	Bio Solar	2018	< 1 Tahun	0.5%	102,720,844.00	513,604.22	513,604.22
	Pertamax Turbo	2018	< 1 Tahun	0.5%	41,323,406.00	206,617.03	206,617.03
	Dexlite	2018	< 1 Tahun	0.5%	408,421,289.00	2,042,106.45	2,042,106.45
	<b>JUMLAH A.....</b>				<b>55,727,784,520.00</b>	<b>279,928,622,52</b>	<b>278,638,922.60</b>
<b>PIUTANG PAJAK AIR PERMUKAAN</b>							
		2011	> 5 Tahun	100.0%	137,859,968.30	137,859,968.30	137,859,968.30
		2014	2 - 5 Tahun	50.0%	1,037,320.00	518,660.00	518,660.00
		2015	2 - 5 Tahun	50.0%	6,206,707.00	3,103,353.50	3,103,353.50
		2016	1 - 2 Tahun	10.0%	1,170,847,299.00	117,084,729.90	117,084,729.90
		2017	1 - 2 Tahun	10.0%	566,048,232.00	56,604,823.20	56,604,823.20
		2018	< 12 Bulan	0.5%	20,537,032,390.00	101,765,087.24	102,685,161.95
	<b>JUMLAH B.....</b>				<b>22,174,417,577.30</b>	<b>416,936,622.14</b>	<b>417,856,696.85</b>
	<b>PIUTANG PAJAK DAERAH JML. A + B.....</b>				<b>78,146,816,436.30</b>	<b>696,865,244.66</b>	<b>696,495,619.45</b>

B.2 Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional .....	2018	2017
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Surplus/Defisit kegiatan Non Operasional Beban non-operasional adalah Surplus/Defisit yang timbul dari kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pemerintah daerah.

Saldo defisit kegiatan non operasional senilai Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2018	2017
1	Surplus Penjualan Aset lancar	0	0
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban	0	0
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0	0
<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas

#### A. Ekuitas Awal

Ekuitas awal adalah ekuitas akhir pada tahun sebelumnya atau tahun 2018. Adapun ekuitas awal pada tahun 2018 senilai Rp. 3.452.187.981.424,97.

#### B. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih pendapatan dengan beban pada laporan operasional. Adapun surplus tahun 2018 senilai Rp.3.690.340.503.159,07.

#### C. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar

Adapun koreksi karena dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dirinci sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00
2	Rekening Konsolidasi (RK)	(3,333,974,432,122,33)
3	Koreksi Aset Tetap	69,680,000,00
4	Koreksi Piutang	18.588.653.110,00
5	Koreksi Penyisihan Piutang	610.793.533,66
6	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	0,00
7	Koreksi Aset Lainnya	0,00
8	Koreksi Pinjaman Modal	0,00
9	Koreksi Investasi	0,00
10	Koreksi Utang	668,121,821,00
11	Koreksi Investasi	0,00
12	Koreksi Asuransi	0,00
13	Koreksi Pendapatan diterima Dimuka	0,00

Adapun rincian dari masing-masing koreksi dapat dirinci sebagai berikut:

i. Koreksi Aset Tetap

No	Keterangan	Debet	Kredit
1	Tanah	69,680,000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>69,680,000,00</b>	<b>0,00</b>

Koreksi Aset Tetap Rp. 69.680.000,00, adalah koreksi Kurang Catat penyajian Aset Tanah sesuai Akta Jual Beli No. 256/PPAT/1996 tanggal 20 Mei 1996.

ii. Koreksi piutang

No	Keterangan	Debet	Kredit
1	Piutang Pajak Air Permukaan	18.588.653.110,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.588.653.110,00</b>	<b>0,00</b>

Koreksi Tambah atas kurang catat piutang pajak Tahun 2016 dan Tahun 2017

iii. Koreksi Penyisihan Piutang

No	Keterangan	Debet	Kredit
1	Koreksi Penyisihan Piutang	610.793.533,66	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>610.793.533,66</b>	<b>0,00</b>

iv. Koreksi Hutang

No	Keterangan	Debet	Kredit
1	Koreksi Hutang	668,121,821,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>668,121,821,00</b>	<b>0,00</b>

Koreksi Hutang pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I sesuai dengan SP2D Nomor : 00571/SP2D/LS-GJ/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.

## D. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan akumulasi ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dan dampak kumulatif/koreksi. Ekuitas akhir per 31 Desember 2018 senilai Rp. 3.828.491.300.926,37

### **3.1.4 Neraca**

#### **A. Aset**

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara kerena alasan sejarah dan budaya, yang terdiri dari:

##### **A.1 Aset Lancar**

<b>A.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran .....</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas dibendahara pengeluaran adalah kas bank dan kas tunai yang berada dalam penguasaan bendahara pengeluaran. Kas Bank dikelola melalui satu rekening giro pada Bank Sulselbar nomor rekening 130-002-000002520-6. Kas dibendahara pengeluaran bersaldo Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
1	Saldo Per 1 Januari 2018	0,00	0,00
	<b>Penerimaan</b>		
2	Pencairan SP2D LS-Gaji	108,579,723,728,00	36,281,551,456,00
3	Pencairan SP2D UP/GU/TU	33,781,262,917,00	134,503,189,470,00
4	Pencairan SP2D LS-Barang dan Jasa	42,542,281,143,00	38,502,956,485,00
5	Penerimaan Pajak PPN (LS/UP/GU/TU)	4,629,158,606,00	4,258,142,089,00
6	Penerimaan Pajak PPh 21 (LS/UP/GU/TU)	5,121,174,813,00	7,269,421,554,00
7	Penerimaan Pajak PPh 22 (LS/UP/GU/TU)	250,143,963,00	260,297,211,00
8	Penerimaan Pajak PPh 23 (LS/UP/GU/TU)	585,481,557,00	515,788,073,00
9	Lain lain	2,313,430,074,00	0,00
	<b>Jumlah.....(1)</b>	<b>197,802,656,801,00</b>	<b>162,652,918,021,00</b>

10	Pengesahan SPJ Gaji	108,579,717,748.00	36,196,271,542.00
11	Pengesahan SPJ UP/GU/TU	32,702,716,494.00	85,055,022,087.00
12	Pengesahan SPJ LS-Barang dan Jasa	42,542,281,143.00	35,495,570,560.00
13	Penyetoran Pajak PPN (UP/GU/TU/LS)	4,629,158,606.00	523,145,594.00
14	Penyetoran Pajak PPh 21 (UP/GU/TU/LS)	5,121,174,813.00	3,596,928,277.00
15	Penyetoran Pajak PPh 22 (UP/GU/TU/LS)	250,143,963.00	48,772,900.00
16	Penyetoran Pajak PPh 23 (UP/GU/TU/LS)	585,481,557.00	113,525,421.00
17	Lain lain	2,313,430,074.00	
18	Penyetoran TU tgl 27 Desember 2018 No Kasda/BIX	773,887,133.00	1,182,654,715.00
19	Penyetoran GU tgl 27 Desember 2018 No Kasda/BIX	304,659,290.00	441,026,925.00
20	Penyetoran Contra Pos Pengeluaran tgl 21 Desember 2018 No Kasda/BIX 28503	5,980.00	0.00
	<b>Jumlah.....(2)</b>	<b>197,802,656,801.00</b>	<b>162,652,918,021.00</b>
	<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2018(1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**A.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan .....** – **31 Des 2018**      **31 Des 2017**  
**0,00**                    **0,00**

Kas dibendahara penerimaan bersaldo Rp.0,00.

Penerimaan pajak, retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dan hibah langsung disetor ke rekening kas daerah.

**A.1.3 Piutang Pajak .....**    **31 Des 2018**      **31 Des 2017**  
**77,294,921,657,30**    **56.726.657.915,30**

Saldo Piutang Pajak senilai Rp.77,294,921,657,30 dengan rincian:

No	Keterangan	2018	2017
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	0.00	0,00
2	Piutang Pajak Bahan Bakar	55,727,784,520.00	53.505.997.870,00
3	Piutang Pajak Air Permukaan	21,567,137,137,30	3.220.660.045,30
4	Piutang Pajak Rokok*	0.00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>77,294,921,657,30</b>	<b>56.726.657.915,30</b>

\*belum ada penetapan dari pemerintah untuk bulan Desember 2018

### **A. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Piutang pajak bahan bakar berasal surat pemberitahuan pajak daerah (SPTP) bulan Desember 2018 senilai Rp. 55.727.784.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis BBM	Saldo Awal	Mutasi			Piutang 2018
			Tambah	Pembayaran	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 (3+4-5-6)
1	Bensin/Premium	17.267.822.354	220.359.108.687	219.080.852.613	0	18.546.078.428
2	Pertamax/Premix	2.785.208.625	31.915.106.632	32.014.272.436	0	2.686.042.821
3	Pertamax Plus	0	0	0	0	0
4	Solar	10.578.082.701	75.581.332.345	82.441.843.724	0	3.717.571.322
5	Pertalite	16.902.811.067	192.354.067.344	191.418.748.078	0	17.838.130.333
6	Pertamina Dex	60.093.488	709.695.408	699.299.121	0	70.489.775
7	Bio Diesel	42.163.862	581.071.397	520.514.415	0	102.720.844
8	Bio Solar	5.716.051.069	111.613.957.943	105.013.002.710	0	12.317.006.302
9	Pertamax Turbo	21.548.936	404.093.631	384.319.161	0	41.323.406
10	Dexlite	130.295.768	2.843.576.207	2.565.450.686	0	408.421.289
	<b>Jumlah</b>	<b>53.504.077.870</b>	<b>636.362.009.594</b>	<b>0</b>	<b>634.138.302.944</b>	<b>0</b>
						<b>55.727.784.520</b>

Adapun rincian piutang berdasarkan wajib pungut sebagai berikut:

JENIS BBM	PERTAMINA	PATRA NIAGA	ELNUSA	LINTAS ARTA	JUMLAH
2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
Bensin/Premium	18.546.078.428	0	0		18.546.078.428
Pertamax/Premix	2.686.042.821	0	0		2.686.042.821
Solar	3.670.485.983	47.085.339	0		3.717.571.322
Pertalite	17.838.130.333	0	0		17.838.130.333
Pertamax Dex	70.489.775	0	0		70.489.775
Bio Solar	9.686.262.712	2.389.497.860	241.245.730		12.317.006.302
Bio Diesel	0	0	0	102.720.844	102.720.844
Pertamax Turbo	41.323.406	0	0		41.323.406
Dexlite	408.421.289				408.421.289
<b>JUMLAH</b>	<b>52.947.234.747</b>	<b>2.436.583.199</b>	<b>241.245.730</b>	<b>102.720.844</b>	<b>55.727.784.520</b>

## B. Piutang Pajak Air Permukaan

Saldo piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember

2018 senilai Rp.22.419.031.916,30 dengan rincian sebagai berikut:

No	UPTB	Saldo awal	Mutasi			PIUTANG 2018
			Tambah	Pembayaran	Kurang	
1	2	3	4	5		7(3+4-5-6)
1	Makassar	158.763.477,00	1.898.114.446	1.897.116.689		159.761.234,00
2	Gowa	145.806.226,00	1.009.441.469	1.085.590.495		69.657.200,00
3	Bone	2.392.908,00	44.905.811	31.409.820		15.888.899,00
4	Parepare	2.825.664,00	50.740.182	47.148.462		6.417.384,00
5	Palopo	28.532.830,00	335.522.528	335.571.142		28.484.216,00
6	Luwu	785.740.270,00	562.341.086	202.923.113		1.145.158.243,00
7	Barru	0,00	24.917.361	22.615.641		2.301.720,00
8	Maros	7.078.617,00	95.713.567	90.024.651		12.767.533,00
9	Sinjai	42.042.552,00	428.117.871	442.124.818		28.035.605,00
10	Wajo	24.190.901,00	148.126.281	160.043.246		12.273.936,00
11	Bantaeng	14.176.780,00	202.274.190	201.771.900		14.679.070,00
12	Jeneponto	15.303.600,00	13.180.759	6.709.518		21.774.841,00
13	Takalar	0,00	116.421.502	116.421.502		0,00
14	Pinrang	1.849.586.566,30	7.411.067.883	7.396.271.700	925.819.820	938.562.929,30
15	Pangkep	14.914.445,00	84.486.340	90.834.843		8.565.942,00
16	Sidrap	764.972,00	26.013.600	24.610.772		2.167.800,00
17	Enrekang	34.944.674,00	214.182.243	204.765.978		44.360.939,00
18	Tator	92.274.798,00	570.209.322	566.911.290		95.572.830,00
19	Luwu Timur	19.506.500.971,00	85.683.205.867	86.240.767.806		18.948.939.032,00
20	Luwu Utara	2.301.624,00	28.408.584	28.312.872		2.397.336,00
21	Soppeng	1.470.281,00	22.775.947	21.572.988		2.673.240,00
22	Bulukumba	991.170,00	11.905.166	11.879.376		1.016.960,00
23	Selayar	1.364.649,00	14.864.048	14.932.656		1.296.041,00
24	Toraja Utara	5.085.000,00	32.738.271	33.439.064		4.384.207,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.737.052.975,30</b>	<b>99.029.674.324</b>	<b>99.273.770.342</b>	<b>925.819.820</b>	<b>21.567.137.137,30</b>

Rekapitulasi piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember  
2018 senilai Rp.21.567.137.137,30 dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI PEMBAYARAN	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
2	3	4	5	6	7 (3+4-5-6)
2018	-	20.610.957.431,00	-	-	20.610.957.431,00
2017	2.068.697.281,00	19.352.404.400,00	20.855.053.449,00	-	566.048.232,00
2016	1.008.778.769,00	162.068.530,00	-	925.819.820	245.027.479,00
2015	6.206.707,00	-	-	-	6.206.707,00
2014	1.037.320,00	-	-	-	1.037.320,00
2011	137.859.968,30	-	-	-	137.859.968,30
JUMLAH	3.222.580.045,30	9.514.472.930,00	20.855.053.449,00	925.819.820	21.567.137.137,30

### C. Piutang Pajak Rokok

Pada tahun 2018 terdapat realisasi penerimaan pajak rokok untuk masa pajak bulan Desember 2017 sehingga saldo awal dikoreksi. Saldo piutang pajak rokok senilai Rp.0 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

No	Masa Pajak	Koreksi saldo awal	Mutasi			Piutang Pajak Rokok
			Tambah	Pembayaran	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 (3+4-5-6)
1	Desember 2017	159,297,918,284	0,00	159,297,918,284	0,00	0,00
2	Triwulan I 2018		25,167,093,129	25,167,093,129	0,00	0,00
3	Triwulan II 2018	0,00	148,552,830,020	148,552,830,020	0,00	0,00
4	Triwulan III 2018	0,00	138,636,146,845	138,636,146,845	0,00	0,00
5	Triwulan IV 2018 (Okt-Nov)	0,00	113,579,433,048	113,579,433,048	0,00	0,00
6	Triwulan IV 2018 (Desember)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>162,177,393,828</b>	<b>425,935,503,042</b>	<b>585,233,421,326</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sampai dengan penyusunan laporan keuangan 2018, pajak rokok Desember 2018 belum ditetapkan pemerintah.

A.1.4 Piutang Retribusi .....	<u>31 Des 2018</u>	<u>31 Des 2017</u>
	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

Saldo piutang lainnya berupa piutang Retribusi Jasa Usaha senilai Rp.0,00.

A.1.5 Penyisihan Piutang...	<u>31 Des 2018</u>	<u>31 Des 2017</u>
	<b>604.283.262,66</b>	<b>518.211.551,66</b>

Penyisihan piutang pada TA. 2018 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kategori:

No	Kriteria	Umur Piutang	Persentase Penyisihan
1	Kualitas lancar	< 1	0,50%
2	Kualitas kurang lancar	1 – 2	10,00%
3	Kualitas diragukan	2< - 5	50,00%
4	Kualitas macet	5 <	100%

Penyisihan piutang dilaksanakan dalam rangka penyajian piutang berdasarkan *net-realizable value*. Penyisihan piutang pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.604.283.262,66 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Ket	Piutang	Peny	Jumlah	2018
A	Piutang Pajak					
1	Pajak Bahan Bakar	Premium	18,546,078,428,00	0,005	92,730,392,14	92,730,392,14
		Pertamax	2,686,042,821,00	0,005	13,430,214,11	13,430,214,11
		Solar	3.717.571.322	0,005	18,587,856,61	18,587,856,61
		Pertamax Dex	17,838,130,333,00	0,005	89,190,651,67	89,190,651,67
		Pertalite	70,489,775,00	0,005	352,448,875	352,448,88
		Bio Diesel	12,317,006,302,00	0,005	61,585,031,51	61,585,031,51
		Bio Solar	102,720,844,00	0,005	513,604,22	513,604,22
		Pertamax Turbo	41,323,406,00	0,005	206,617,03	206,617,03
		Dexlite	408,421,289,00	0,005	2,042,106,45	2,042,106,45
	<b>Jumlah 1</b>		<b>55.727.784.520,00</b>		<b>278.638.922,60</b>	<b>278.638.922,60</b>
2	Pajak Air Permukaan	2018	20,610,957,431,00	0,005	102.685.161,95	102.685.161,95
		2017	566,048,232,00	0,01	56.604.823,20	56.604.823,20
		2016	245.027.479,00	0,01	24.872.373,11	24.872.373,11
		2015	6,206,707,00	0,5	3.103.353,50	3.103.353,50
		2014	1,037,320,00	0,5	518.660,00	518.660,00
		2011	137,859,968,30	1	137.859.968,30	137.859.968,30
	<b>Jumlah 2</b>		<b>21.567.137.137,30</b>		<b>325.644.340,06</b>	<b>325.644.340,06</b>
	<b>Total (1+2+3)</b>		<b>77.294.921.657,30</b>		<b>604.283.262,66</b>	<b>604.283.262,66</b>

<b>A.1.6 Belanja Dibayar Dimuka .....</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Belanja Dibayar Dimuka Senilai Rp. 0,00

<b>A.1.7 Persediaan .....</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
	<b>1.071.830.939,00</b>	<b>1.339.532.300,00</b>

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2018 senilai Rp.1.071.830.939,00 terdiri dari persediaan ATK dan Cetakan pada Badan dan UPTB dengan rincian sebagai berikut:

No	Badan/UPTB	ATK	CETAKAN	Jumlah
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Sekretariat	14,028,000.00	515,976,376.00	530,004,376.00
2	Bid Pajak	930,000.00	157,165,000.00	158,095,000.00
3	Bid Pengawasan	166,500.00	0.00	166,500.00
4	Bid Perencanaan	1,014,800.00	375,000.00	1,389,800.00
5	Bid T S I	54,500.00	0.00	54,500.00
6	UPTB Wil Bantaeng	875,000.00	5,331,457.00	6,206,457.00
7	UPTB Wil Barru	6,688,000.00	1,631,502.00	8,319,502.00
8	UPTB Wil Bone	2,449,500.00	5,672,467.00	8,121,967.00
9	UPTB Wil Bulukumba	5,171,000.00	5,352,300.00	10,523,300.00
10	UPTB Wil Enrekang	16,257,000.00	3,165,282.00	19,422,282.00
11	UPTB Wil Gowa	2,656,000.00	8,955,000.00	11,611,000.00
12	UPTB Wil Jeneponto	6,010,500.00	17,536,461.00	23,546,961.00
13	UPTB Wil Luwu	735,500.00	15,054,562.00	15,790,062.00
14	UPTB Wil Luwu Timur	6,171,388.00	7,688,800.00	13,860,188.00
15	UPTB Wil Luwu Utara	3,038,500.00	1,806,029.00	4,844,529.00
16	UPTB Wil Makassar I	15,967,500.00	14,829,069.00	30,796,569.00
17	UPTB Wil Maros	4,805,000.00	5,951,584.00	10,756,584.00
18	UPTB Wil Palopo	4,771,000.00	4,598,820.00	9,369,820.00
19	UPTB Wil Pangkep	15,317,000.00	6,618,500.00	21,935,500.00
20	UPTB Wil Parepare	9,710,000.00	4,485,483.00	14,195,483.00
21	UPTB Wil Pinrang	2,296,000.00	6,139,443.00	8,435,443.00
22	UPTB Wil Selayar	5,057,000.00	4,780,776.00	9,837,776.00
23	UPTB Wil Sidrap	8,588,000.00	7,532,318.00	16,120,318.00
24	UPTB Wil Sinjai	11,148,000.00	7,192,940.00	18,340,940.00
25	UPTB Wil Soppeng	14,984,500.00	11,274,016.00	26,258,516.00
26	UPTB Wil Takalar	4,141,500.00	5,752,000.00	9,893,500.00
27	UPTB Wil Tana Toraja	775,000.00	4,134,709.00	4,909,709.00
28	UPTB Wil Toraja Utara	4,524,000.00	5,778,400.00	10,302,400.00
29	UPTB Wil Makassar II	19,841,500.00	40,990,457.00	60,831,957.00
30	UPTB Wil Wajo	3,813,500.00	4,076,500.00	7,890,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>191,985,688.00</b>	<b>879,845,251.00</b>	<b>1,071,830,939.00</b>

## A.2 Aset Tetap

A.2.1 Tanah .....	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
	<b>20.456.981.000,00</b>	<b>12.493.154.000,00</b>

Saldo tanah per 31 Desember 2018 senilai

Rp.20.456.981.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Saldo Awal 1 Jan 2018	Mutasi		Jumlah
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Tanah	12,493,154,000	8,088,468,000	124,641,000	20,456,981,000
	<b>Jumlah</b>	<b>12,493,154,000</b>	<b>8,088,468,000</b>	<b>124,641,000</b>	<b>20,456,981,000</b>

Penambahan Aset Tanah berasal dari mutasi dari:

- Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp. 1.666.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Mutasi Nomor: 032/2341/Bapenda tanggal 02 April 2018
- Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp. 621.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Mutasi Nomor: 032/4395/DSDA-CKTR tanggal 11 Juli 2018
- Hibah dari Pemeritah Kabupaten Jeneponto senilai Rp.360.000.000,00 sesuai SK Bupati No. 264 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016
- Hibah dari Pemerintah Kabupaten Sidrap senilai Rp.2.158.992.000,00 sesuai SK Bupati Nomor 285/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.
- Hibah dari Pemerintah Kabupaten Gowa senilai Rp.3.142.296.000,00 sesuai dengan SK Gubernur Nomor: 2102/VII/Tahun 2018 Tanggal 23 Juli 2018.
- Akta Jual Beli Nomor 256/PPAT/1996 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp69.680.000,00.
- Reklasifikasi Aset dari Belanja Pensertifikatan Tanah ke Tanah berdasarkan Hasil Review Laporan Keuangan Pemprov Sul Sel TA. 2018 Nomor : 700.04/1234/A.1/ltda senilai Rp. Rp. 70.000.000,00.

Sedangkan pengurangan asset Tanah senilai Rp.124.641.000,00 yaitu mutasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 032/8107/BAPENDA tanggal 07 Agustus 2018.

<b>A.2.2 Peralatan dan Mesin..</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
	<b>85.761.253.004,00</b>	<b>77.734.750.154,00</b>

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 senilai Rp. 85.761.253.004,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Saldo Awal 1 Jan 2018	Mutasi		Jumlah
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Alat-alat angkutan	16,273,505,200	1,520,461,500	0	17,793,966,700
2	Alat-alat bengkel	1,355,120,000	402,700,000	0	1,757,820,000
3	Alat-alat kantor & rumah tangga	55,785,594,045	5,873,341,350	0	61,658,935,404
5	Alat studio dan komunikasi	3,438,444,900	258,200,000	28,200,000	3,668,444,900
4	Alat keamanan	882,086,000	0	0	882,086,000
	Jumlah	77,734,750,145	8,023,502,850	28.200.000	85,761,253,004

a. Alat-alat Angkutan      31 Des 2018      31 Des 2017  
17.793.966.700,00      16.273.505.200,00

Saldo alat-alat angkutan per 31 Desember 2018 senilai Rp.17.793.966.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan		Jumlah
1	Saldo Per 1 Januari 2018		16,273,505,200.00
2	Realisasi belanja 2018	Alat Angkutan darat bermotor	390,061,500.00
	Mutasi Tambah	Mutasi dari Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	1,130,400,000.00
	<b>Saldo akhir (31/12/2018)</b>		<b>17,793,966,700.00</b>

Mutasi tambah alat angkutan berasal dari mutasi dari Biro Pengelolaan Barang dan Aset Setda Provinsi Sulawesi Selatan berupa alat angkutan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit sesuai dengan Berita Acara Mutasi Barang Inventaris Nomor : 024/0653/B.ASET tanggal 30 Januari 2018.

b. Alat-alat Bengkel      31 Des 2018      31 Des 2017  
1.757.820.000,00      1.355.120.000,00

Saldo alat-alat bengkel per 31 Desember 2018 senilai Rp.1.757.820.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan		Jumlah
1	Saldo Per 1 Januari 2018		1,355,120,000
2	Realisasi belanja 2018	Alat Bengkel	402,700,000
	<b>Saldo akhir (31/12/2018)</b>		<b>1,757,820,000</b>

<b>c. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga.....</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
	<b>61.658.935.404,00</b>	<b>55.785.594.054,00</b>

Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2018 senilai Rp. 61.658.935.404,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo Per 1 Januari 2018	55,785,594,054
2	Realisasi belanja 2018 Alat kantor	1,320,250,000
	Perlengkapan kantor	823,000,000
	Komputer	2,963,097,600
	Mebelair	529,450,000
	Peralatan Dapur	8,000,000
	Penghias ruang	198,343,750
3	Mutasi Tambah Reklas dari Bangunan Gedung	3,000,000
	Reklasifikasi dari Alat Studio dan Alat Komunikasi	28,200,000
	<b>Saldo akhir (31/12/2018)</b>	<b>61,658,935,404</b>

Terdapat mutasi tambah reklassifikasi dari Bangunan Gedung ke Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.3.000.000,00. serta Reklassifikasi dari Alat Studi dan Alat Komunikasi ke Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga senilai Rp. 28.200.000,00

<b>d. Alat Studio dan Komunikasi .....</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
	<b>3.668.444.900,00</b>	<b>3.446.044.900,00</b>

Saldo alat studi dan komunikasi per 31 Desember 2018 senilai Rp.3.668.444.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo Per 1 Januari 2018	3,438,444,900
2	Realisasi belanja 2018 Alat studio	30,000,000
	Alat komunikasi	228,200,000
3	Mutasi berkurang Reklasifikasi Ke Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	(28,200,000)
	<b>Saldo akhir (31/12/2018)</b>	<b>3,668,444,900</b>

Mutasi berkurang atas reklassifikasi dari Alat Studio dan Alat Komunikasi ke Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga senial Rp. 28.200.000,00

<b>e. Alat Keamanan ....</b>	<b><u>31 Des 2018</u></b>	<b><u>31 Des 2017</u></b>
	<b>882.086.000,00</b>	<b>882.086.000,00</b>

Saldo alat keamanan per 31 Desember 2018 senilai Rp.882.086.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo Per 1 Januari 2018	882.086.000
2	Realisasi belanja 2018	
	<b>Saldo akhir (31/12/2018)</b>	<b>882.086.000</b>

<b>A.2.3 Gedung dan</b>	<b><u>31 Des 2018</u></b>	<b><u>31 Des 2017</u></b>
<b>Bangunan.....</b>	<b>55.500.211.377,00</b>	<b>43.284.496.477,00</b>

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 senilai Rp.55.500.211.377,00. merupakan Bangunan Gedung.

No	Keterangan	Saldo Awal 1 Jan 2018	Mutasi		Jumlah
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Bangunan Gedung	43.579.677.477	12.051.108.900	130.575.000	55.500.211.377
<b>Jumlah</b>		<b>43.579.677.477</b>	<b>12.051.108.900</b>	<b>130.575.000</b>	<b>55.500.211.377</b>

<b>1. Bangunan Gedung</b>	<b><u>31 Des 2018</u></b>	<b><u>31 Des 2017</u></b>
	<b>55.500.211.377,00</b>	<b>43.579.677.477,00</b>

Saldo bangunan gedung per 31 Desember 2018 senilai Rp.55.500.211.377,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo Per 1 Januari 2018	43,579,677,477
2	Realisasi belanja 2018 Bangunan Gedung	8,549,882,000
	Mutasi Tambah Mutasi antar OPD Hibah dari Pemerintah Kabupaten Reklasifikasi dari KDP	1,020,831,750 749,815,150 1,730,580,000
3	Mutasi berkurang Mutasi Ke Dinas Pendidikan Reklasifikasi ke Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	(127,575,000) (3,000,000)
	<b>Saldo akhir (31/12/2017)</b>	<b>55,500,211,377</b>

Penambahan Aset Bangunan berasal dari mutasi dari:

- Dinas Sumber Daya Air, Clpta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp. 306.800.000,00 sesuai dengan Berita Acara Mutasi Nomor: 032/2341/Bapenda tanggal 02 April 2018
- Dinas Sumber Daya Air, Clpta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp. 714.031.750,00 sesuai dengan Berita Acara Mutasi Nomor: 032/4395/DSDA-CKTR tanggal 11 Juli 2018
- Hibah dari Pemerintah Kabupaten Sidrap senilai Rp. 749.815.150,00 sesuai SK Bupati Nomor 285/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.

Sedangkan pengurangan asset Tanah senilai Rp. 127.575.000,00 yaitu mutasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 032/8107/BAPENDA tanggal 07 Agustus 2018. Serta Reklasifikasi ke Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga senilai Rp. 3.000.000,00.

<b>A.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan .....</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
	<b>1.859.675.950,00</b>	<b>1.688.013.950,00</b>

Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 senilai Rp.1.895.675.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Saldo Awal 1 Jan 2018</b>	<b>Mutasi</b>		<b>Jumlah</b>
			<b>Tambah</b>	<b>Kurang</b>	
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Instalasi	1,259,958,350	171,662,000	0,00	1,431,620,350
4	Jaringan	428,055,600	0,00	0,00	428,055,600
<b>Jumlah</b>		<b>1,688,013,950</b>	<b>171,662,000</b>	<b>0,00</b>	<b>1,859,675,950</b>

<b>1. Jalan .....</b>	<b><u>31 Des 2018</u></b>	<b><u>31 Des 2017</u></b>
	0,00	0,00

Saldo Jalan per 31 Desember 2018 senilai Rp. 0,00

<b>2. Irigasi.....</b>	<b><u>31 Des 2018</u></b>	<b><u>31 Des 2017</u></b>
	0,00	0,00

Saldo irigasi per 31 Desember 2018 senilai Rp. 0,00.

<b>3. Instalasi.....</b>	<b><u>31 Des 2018</u></b>	<b><u>31 Des 2017</u></b>
	<b>1.431.620.350,00</b>	<b>1.259.958.350,00</b>

Saldo Instalasi per 31 Desember 2018 senilai

Rp1.413.620.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo Per 1 Januari 2018	1,259,958,350
2	Realisasi belanja 2018 LRA 2018	171,662,000
3	Mutasi berkurang	0,00
	<b>Saldo akhir (31/12/2018)</b>	<b>1,431,620,350</b>

<b>4. Jaringan .....</b>	<b><u>31 Des 2018</u></b>	<b><u>31 Des 2017</u></b>
	<b>428.055.600,00</b>	<b>428.055.600,00</b>

Saldo jaringan per 31 Desember 2018 senilai

Rp.428.055.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo Per 1 Januari 2018	428.055.600
2	Realisasi belanja 2018 LRA 2018	0,00
	<b>Saldo akhir (31/12/2018)</b>	<b>428.055.600</b>

<b>A.2.5 Aktiva Tetap Lainnya</b>	<b><u>31 Des 2018</u></b>	<b><u>31 Des 2017</u></b>
	<b>34.970.775,00</b>	<b>34.970.775,00</b>

Saldo Aktiva Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 senilai Rp.34.970.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Saldo Awal 1 Jan 2018	Mutasi		Jumlah
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Buku Perpustakaan	34.970,77	0	0	34.970,775
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>34.970,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.970.775</b>

<b>1. Buku dan Perpustakaan.....</b>	<b>– 31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
	<b>34.970.775,00</b>	<b>34.970.775,00</b>

Saldo buku dan perpustakaan per 31 Desember 2018 senilai Rp.34.970.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo Per 1 Januari 2018	34.970.775
2	Realisasi belanja 2018	0
3	<b>Saldo akhir (31/12/2017)</b>	<b>34.970.775</b>

<b>A.2.6 Konstruksi Dalam Penggerjaan .....</b>	<b>– 31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
	<b>0,00</b>	<b>1.730.580.000,00</b>

Saldo konstruksi dalam penggerjaan per 31 Desember 2018 senilai Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo Per 1 Januari 2018	1.730.580.000
2	Reklasifikasi ke Bangunan Gedung	(1.730.580.000)
4	<b>Saldo akhir (31/12/2018)</b>	<b>0,00</b>

Mutasi berkurang karena Reklasifikasi Aset dari Konstruksi Dalam Penggerjaan ke Bangunan Gedung atas terselesaikannya Pembangunan Gedung Kantor Sam Sat Toraja Utara.

<b>A.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....</b>	<b>– 31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2016</b>
	<b>68.902.999.255,00</b>	<b>51.793.896.887,00</b>

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2018 senilai Rp 68.902.999.255,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Saldo Awal 1 Jan 2018	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang	Jumlah
			Penyusutan 2018	Koreksi Saldo Awal		
1	2	3	4	5	6	8 (3+4+5-6-7)
1	Peralatan dan Mesin	53.414.207,552	8.479.191,246	119.00		61.893.398,917

2	Gedung dan Bangunan	4,831,523,720	1,893,335,730	3,911,252	10,418,625	6,718,352,077
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	246,739,807	44,508,460	0.00	6.00	291,248,261
4	Aset Tetap lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>58,492,471,079</b>	<b>10,417,035,436</b>	<b>3,911,371</b>	<b>10,418,631</b>	<b>68,902,999,255</b>

Penambahan Penyusutan Aset Tetap berasal dari Penyustan Tahun 2018 senilai Rp. 10. 417.035.508,00 serta koreksi saldo awal Rp.3.911.252,00 dikarenakan adanya koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan berdasarkan Update Aplikasi SIMBA-BMD Tahun 2018.

Sedangkan pengurangan Penyusutan Aset Tetap berasal dari koreksi saldo awal Rp. 10.418.631,00, dikarenakan adanya koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan berdasarkan Update Aplikasi SIMBA-BMD Tahun 2018.

### A.3 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2018 senilai Rp.4.090.966.000,00 Saldo tersebut merupakan nilai dari asset tak berwujud.

<b>A.3.1 Aset Tak Berwujud .....</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2016</b>
	<b>4.090.966.000,00</b>	<b>3.028.087.000,00</b>

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 senilai Rp.4.090.966.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo Per 1 Januari 2018	3.028.087.000
2	Realisasi LRA 2018	1.062.159.000
4	<b>Saldo akhir (31/12/2018)</b>	<b>4.090.966.000</b>

### B. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo kewajiban per 31 Desember 2018 senilai Rp.38.037.220.410, Saldo tersebut merupakan kewajiban Jangka Pendek.

## B.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 senilai Rp.38.039.499.597,00. Saldo tersebut merupakan Pendapatan diterima dimuka dan utang beban jasa.

B.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka . -	<u>31 Des 2018</u>	<u>31 Des 2017</u>
	<b>3.733.572.662,00</b>	<b>4.159.567.300,00</b>

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2018 senilai Rp.3.733.572.662,00 merupakan penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018 yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang jatuh tempo tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening	2018	2017
1	A-1 Sedan,Jeep,Station Wagon (Pribadi)	2,786,156,394	2,609,890,350
2	A-2 Sedan,Jeep,Station Wagon (Umum)	10,419,250	10,736,100
3	B-1 Bus,Microbus (Pribadi)	253,980,750	242,566,500
4	B-2 Bus,Microbus (Umum)	0.00	0.00
5	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	568,547,743	688,362,800
6	C-2 Truck, Pickup (Umum)	53,580,800	31,952,700
7	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0.00	0.00
8	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0.00	0.00
9	E-1 Sepeda Motor, Scooter	0.00	557,222,250
10	A-3 Sedan,Jeep,Station Wagon (Dinas)	39,543,000	5,853,750
11	B-3 Bus,Microbus (Dinas)	0.00	0.00
12	C-3 Truck, Pickup (Dinas)	7,992,225	8,881,850
13	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0.00	0.00
14	E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	13,352,500	4,101,000
	<b>Jumlah</b>	<b>3,733,572,662</b>	<b>4,159,567,300</b>

Adapun rincian penerimaan pendapatan diterima dimuka perbulan terlampir.

<b>B.1.2 Utang Beban .....</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
	<b>34.305.926.935,00</b>	<b>16.973.544.338,00</b>

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2018 senilai Rp.34.305.926.935,00 terdiri:

a. Utang beban pegawai terdiri dari

- insentif pungutan pajak daerah senilai Rp.33.877.595.625,00.
- Kekurangan Gaji Desember 2018 Rp. 5.547.614,00

b. Utang beban barang dan jasa senilai Rp.422.783.696,00.

Saldo tersebut adalah utang beban jasa bersumber dari pemakaian Air, listrik, telpon dan imternet pada bulan Desember 2018 pada Kantor Bapenda dan UPTB dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Listrik	Air	Telep	Interne
1	KANTOR PUSAT	47,683,612	40,000	4,993,100	195,144,338
2	UPTP WIL. MAKASSAR I	3,742,898	0	2,037,311	0
3	UPTP WIL. MAKASSAR II	8,326,814	0	2,075,250	0
4	UPTP WIL. PARE PARE	7,800,410	71,400	0	0
5	UPTP WIL. PALOPO	7,821,766	1,027,500	1,010,960	0
6	UPTP WIL.BONE	23,554,437	0	447,989	0
7	UPTP WIL. WAJO	11,469,424	429,400	1,148,236	0
8	UPTP WIL. BANTAENG	4,866,453	733,100	514,147	0
9	UPTP WIL. GOWA	11,694,067	46,500	1,313,515	0
10	UPTP WIL. MAROS	4,823,595	309,100	361,500	0
11	UPTP WIL. PANGKEP	5,953,919	269,700	1,284,910	0
12	UPTP WIL. SIDRAP	6,848,959	444,100	694,070	0
13	UPTP WIL. TANA TORAJA	1,013,641	198,500	389,070	0
14	UPTP WIL. LUWU TIMUR	6,901,077	0	1,009,000	0
15	UPTP WIL. SOPPENG	3,051,463	0	570,570	0
16	UPTP WIL. BULUKUMBA	6,804,100	0	559,570	0
17	UPTP WIL. BARRU	5,167,456	0	306,570	0
18	UPTP WIL. LUWU	2,406,698	0	511,500	0
19	UPTP WIL. SINJAI	3,481,095	210,410	478,500	0
20	UPTP WIL. SELAYAR	3,337,817	0	551,750	0
21	UPTP WIL. TORAJA UTARA	974,155	0	262,775	0
22	UPTP WIL. LUWU UTARA	6,385,016	0	668,800	0
23	UPTP WIL. JENEPOTO	2,906,378	0	941,170	0
24	UPTP WIL. TAKALAR	4,733,142	404,000	373,395	0
25	UPTP WIL. ENREKANG	6,597,294	228,020	591,545	0
26	UPTP WIL. PINRANG	808,599	639,070	339070	0
<b>JUMLAH</b>		<b>199,154,285</b>	<b>5,050,800</b>	<b>23,434,273</b>	<b>195,144,338</b>
<b>TOTAL</b>					<b>422,783,696</b>

### C. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan. Saldo ekuitas pada neraca merupakan saldo akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas per 31 Desember 2018 senilai Rp.138.524.028.587,64 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2018	2017
1	Ekuitas	3.828.491.300.926,37	3.452.187.981.424,97
2	RK PPKD	(3.689.967.272.338,73)	(3.333.974.432.122,33)
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>138.524.028.587,64</b>	<b>118.213.549.302,64</b>

### 3.2. Pengungkapan atas pos-pos yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual

Pengungkapan atas pos-pos pendapatan dan beban serta rekonsiliasi dengan basis kas telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, sehingga tidak diuraikan kembali.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN OPD**

#### **4.1 Struktur Organisasi**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berlokasi di Jalan A.P. Pettarani No. 1 Makassar. Adapun Struktur organisasi Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Program;
  - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
  - a) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
  - b) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
  - c) Sub Bidang Peraturan Pendapatan Daerah.
4. Bidang Pendapatan Asli Daerah Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
  - a) Sub Bidang PAD I;
  - b) Sub Bidang PAD II;
  - c) Sub Bidang PAD III.
5. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi Lainnya dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
  - a) Sub. Bidang Data dan Informasi;
  - b) Sub Bidang Infrastruktur Jaringan dan Pengembangan Aplikasi;

- c) Sub Bidang Verifikasi dan Vaidasi Objek dan Subjek Pajak;
6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - b) Sub Bidang Pengawasan;
  - c) Sub Bidang Penegakan Hukum dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
7. Unit Pelaksana Teknis BADAN (UPTB) dipimpin oleh kepala UPTB dan membawahi 3 (tiga) Sub bagian/Seksi, yaitu:
- a) Sub Bagian Tata Usaha;
  - b) Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - c) Seksi Penagihan dan Penerimaan.

#### **4.2 Tugas dan Fungsi OPD**

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta

- pengendalian dan pembinaan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan; dan

#### **4.3 Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan data bulan Desember 2017, jumlah Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak **45** orang yang terdiri dari PNS laki-laki **294** orang dan PNS perempuan **159** orang. Adapun rincian pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN				J K		ESELON			STAF	JUMLAH PNS
		IV	III	II	I	LK	PR	II	III	IV		
1	SEKRETARIAT	1	27	14	0	27	15	1	1	3	37	42
2	BID. PENDAPATAN ASLI DAERAH	1	13	1	0	10	5	0	1	3	11	15
3	BID. PERENCANAAN	2	11	1	0	8	6	0	1	3	10	14
4	BID. PEMBINAAN& PENGAWASAN	1	10	2	0	7	6	0	1	3	9	13
5	BID. TEKNOLOGI & SISTEM INFOR	1	7	6	0	10	4	0	1	2	11	14
6	UPT PEND. WIL. MAKASSAR I	2	28	5	0	21	14	0	1	3	31	35
7	UPT PEND. WIL. MAKASSAR II	4	25	1	0	15	15	0	1	3	26	30
8	UPT PEND. WIL. PARE-PARE	1	10	4	0	12	3	0	1	2	12	15
9	UPT PEND. WIL. PALOPO	0	9	2	0	10	1	0	1	3	7	11
10	UPT PEND. WIL. BONE	2	11	3	0	8	8	0	1	3	12	16
11	UPT PEND. WIL. WAJO	1	8	3	0	7	5	0	1	3	8	12
12	UPT PEND. WIL. BANTAENG	3	8	2	0	10	3	0	1	3	9	13
13	UPT PEND. WIL. GOWA	1	18	4	0	14	9	0	1	3	19	23
14	UPT PEND. WIL. PINRANG	3	7	3	0	7	6	0	1	3	9	13
15	UPT PEND. WIL. MAROS	3	15	2	1	13	8	0	1	3	17	21
16	UPT PEND. WIL. PANGKEP	1	15	0	0	9	7	0	1	3	12	16
17	UPT PEND. WIL. SIDRAP	0	11	3	0	5	9	0	1	3	10	14
18	UPT PEND. WIL. TANA TORAJA	2	6	2	0	7	3	0	1	3	6	10
19	UPT PEND. WIL. LUWU TIMUR	0	7	4	0	10	1	0	1	3	7	11
20	UPT PEND. WIL. SOPPENG	2	9	1	0	7	5	0	1	3	8	12
21	UPT PEND. WIL. BULUKUMBA	4	5	3	0	9	3	0	1	3	8	12
22	UPT PEND. WIL. BARRU	2	9	0	0	8	3	0	1	3	7	11
23	UPT PEND. WIL. LUWU	0	14	0	0	11	3	0	1	3	10	14
24	UPT PEND. WIL. SINJAI	2	9	1	0	8	4	0	1	3	8	12
25	UPT PEND. WIL. JENEPOTO	3	11	2	0	15	1	0	1	3	12	16
26	UPT PEND. WIL. TAKALAR	1	10	3	0	13	1	0	1	3	10	14
27	UPT PEND. WIL. ENREKANG	2	9	2	0	9	4	0	1	3	9	13
28	UPT PEND. WIL. TORAJA UTARA	2	5	2	0	5	4	0	1	3	5	9
29	UPT PEND. WIL. LUWU UTARA	1	5	4	0	6	4	0	1	3	6	10
30	UPT PEND. WIL. SELAYAR	1	7	3	0	7	4	0	1	2	8	11
<b>TOTAL</b>		<b>49</b>	<b>339</b>	<b>83</b>	<b>1</b>	<b>308</b>	<b>164</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>87</b>	<b>354</b>	<b>472</b>
<b>J U M L A H</b>		<b>472</b>										

#### **4.4 Visi dan Misi**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah ikut berusaha mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan. Untuk mencapai hal tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan visi “Maksimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif.”

Visi tersebut di atas mengandung 2 (dua) substansi utama yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang maksimal dan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel dan inovatif. Visi tersebut diatas merupakan komitmen dari seluruh elemen yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Good and Clean Government).

Untuk mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) per tahun dan total Pendapatan Daerah sekitar 10% (sepuluh persen) per tahun;
2. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak;
3. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam mengelola pendapatan daerah;
4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian

## **BAB V**

## **PENUTUP**

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif analisis atau daftar terperinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018

Makassar, 31 Januari 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**Drs. H. TAUTOTO, T.R., M. Si**

Pangkat Pembina Utama Madya  
NIP. 19640811 199303 1 006